



REPUBLIK
INDONESIA

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2022 – 2024



Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)

Desember 2021





REPUBLIK
INDONESIA

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2022 – 2024

Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)

Desember 2021

DAFTAR ISI

Prakata	6
Ringkasan Eksekutif	8



BAB I
LATAR BELAKANG

12



BAB II
EVALUASI PETA JALAN
PENGENDALIAN INFLASI
2019 - 2021

20

2.1	Evaluasi Pencapaian Inflasi 2019-2021	24
2.2	Evaluasi Pencapaian Program Kerja 2019-2021	27
2.2.1.	Keterjangkauan Harga (K1)	27
2.2.2.	Ketersediaan Pasokan (K2)	28
2.2.3.	Kelancaran Distribusi (K3)	31
2.2.4.	Komunikasi Efektif (K4)	31
2.3	Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)	32
2.3.1.	Keterjangkauan Harga (K1)	32
2.3.2.	Ketersediaan Pasokan (K2)	34
2.3.3.	Kelancaran Distribusi (K3)	36
2.3.4.	Komunikasi Efektif (K4)	36



3.1	Arah Kebijakan	42
3.2	Program Kerja	43
3.2.1.	Keterjangkauan Harga (K1)	44
3.2.2.	Ketersediaan Pasokan (K2)	45
3.2.3.	Kelancaran Distribusi (K3)	49
3.2.4.	Komunikasi Efektif (K4)	50

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Inflasi dan Sasaran	15	Grafik 2.14.	Realisasi PMN BULOG	29
Grafik 1.2.	Inflasi Pra dan Pasca Covid-19	15	Grafik 2.15.	Stok Beras BULOG	30
Grafik 1.3.	Persentase Provinsi Menurut Capaian Inflasi	16	Grafik 2.16.	Pengguna Data PIHPS	32
Grafik 1.4.	Disparitas Inflasi Spasial	16	Grafik 2.17.	Inflasi Tahunan 10 Komoditas Pangan Utama	33
Grafik 1.5.	Inflasi IHK di Kawasan	16	Grafik 2.18.	Selisih Standar Deviasi dan Bobot Komoditas Pangan	34
Grafik 1.6.	Inflasi Pangan di Kawasan	17	Grafik 2.19.	HET dan Harga Jual	34
Grafik 2.1.	Perkembangan Realisasi Inflasi	24	Grafik 2.20.	Perkembangan Penyaluran KPSH	34
Grafik 2.2.	Sumbangan Inflasi Inti Berdasarkan Kelompok Komoditas	24	Grafik 2.21.	Pasokan dan Harga Aneka Cabai	35
Grafik 2.3.	Mobilitas Penduduk	24	Grafik 2.22.	Jumlah Petani Pengguna Internet	35
Grafik 2.4.	Ekspektasi Inflasi	25	Grafik 2.23.	Perkembangan Impor Bawang Putih	36
Grafik 2.5.	Tekanan Eksternal	25	Grafik 2.24.	Biaya Logistik per PDB	36
Grafik 2.6.	Mobilitas Sektor Kafe/Restoran	25	Grafik 2.25.	Ekspektasi Inflasi	37
Grafik 2.7.	Sumbangan Inflasi VF Berdasarkan Komoditas	26	Grafik 2.26.	Kinerja TPID 2019-2020	37
Grafik 2.8.	Disparitas Inflasi VF Spasial	26	Grafik 3.1.	Indeks Ketahanan Pangan	43
Grafik 2.9.	Sumbangan Inflasi AP	26	Grafik 3.2.	Penggunaan Internet	43
Grafik 2.10.	Perkembangan Determinan Harga Energi AP	27	Grafik 3.3.	Potensi Pertumbuhan <i>E-Commerce</i> Indonesia	43
Grafik 2.11.	Perkembangan Inflasi Rokok	27			
Grafik 2.12.	Bantuan Alsintan Pra dan Pascapanen	28			
Grafik 2.13.	Produktivitas Menurut Penggunaan Mesin Pertanian	29			

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Inflasi Spasial, November 2021	16
Gambar 1.2.	<i>Framework</i> Penyusunan Peta Jalan 2022-2024	17
Gambar 2.1.	Gudang Komoditas Pangan dan Gudang Modern	29
Gambar 2.2.	Model Bisnis KAD DKI Jakarta	31
Gambar 2.3.	<i>Timeline</i> Pengembangan PIHPS	32
Gambar 2.4.	Sentra Produksi Pangan	35
Gambar 3.1	<i>Framework</i> Peta Jalan 2022-2024	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kolerasi Data PIHPS dan BPS	37
----------------------	-----------------------------	-----------

PRAKATA



Airlangga Hartarto

Ketua Tim Pengendalian
Inflasi Pusat

Salam hangat,

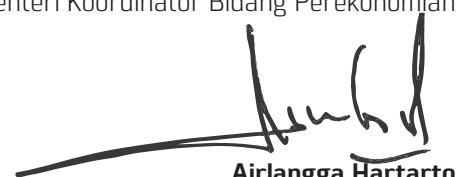
Pandemi Covid-19 mengakibatkan ketidakpastian terhadap perekonomian global. Sepanjang tahun 2020-2021, pembatasan mobilitas di berbagai negara mengakibatkan perlambatan perekonomian, termasuk Indonesia. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami kontraksi. Menyikapi kondisi tersebut, berbagai upaya dari Pemerintah telah berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam pada tahun 2020, yang hanya sebesar -2,07% (yoy). Hal tersebut membuat Indonesia menempati peringkat ke-4 di antara negara G20 sebagai negara yang memiliki kontraksi ekonomi terkecil. Pada triwulan II 2021, Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan positif sebesar 7,07% (yoy). Pertumbuhan positif tersebut adalah yang pertama kali sejak merebaknya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020. Pada triwulan III 2021 pertumbuhan perekonomian Indonesia melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya, tumbuh sebesar 3,51% (yoy). Tetapi, perekonomian tetap tumbuh positif di tengah merebaknya varian delta Covid-19.

Terjaganya daya beli masyarakat selama pandemi adalah salah satu kunci untuk dapat mendorong pemulihan ekonomi. Hal tersebut dapat terwujud karena inflasi terjaga dengan stabil di level rendah. Dalam kurun waktu 2017-2019, realisasi inflasi tahunan telah berhasil dijaga pada rentang sasaran dengan tren menurun, masing-masing pada level 3,61% (2017), 3,13% (2018) dan 2,72% (2019). Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan permintaan domestik yang menyebabkan realisasi inflasi tahunan berada di bawah kisaran sasaran, yaitu pada level 1,68%. Pada 2021, seiring terkendalinya penanganan kasus Covid-19, permintaan domestik menunjukkan perbaikan yang tercermin dari meningkatnya tren mobilitas masyarakat. Namun, realisasi inflasi tahunan diperkirakan masih akan tetap rendah dan berada di bawah kisaran sasaran.

Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, telah menetapkan sasaran inflasi nasional 2022-2024 melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 pada level $3,0\% \pm 1,0\%$ (2022), $3,0\% \pm 1,0\%$ (2023), dan $2,5\% \pm 1,0\%$ (2024). Penetapan sasaran laju inflasi tersebut memiliki tren menurun agar tetap menjaga tingkat inflasi pada level yang rendah. Sejalan dengan penetapan sasaran inflasi dan sebagaimana amanat dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 148 Tahun 2017, penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi diperlukan sebagai acuan dalam melaksanakan aksi pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Peta Jalan Pengendalian Inflasi juga menunjukkan solidnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dan sesuai dengan amanat dari Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN). Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 menjabarkan langkah-langkah mitigasi, serta berbagai tantangan yang datang baik dari dalam dan luar negeri.

Pada akhirnya, dibutuhkan komitmen penuh dan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan secara optimal, serta dapat membuahkan hasil sebagaimana yang dihasilkan dari Peta Jalan sebelumnya. Mari kita bekerja lebih erat demi Indonesia yang semakin baik di tengah krisis yang menerpa.

Jakarta, 30 Desember 2021
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat

RINGKASAN EKSEKUTIF





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laju inflasi di Indonesia terus mengalami tren penurunan dan berada dalam kisaran sasarannya, kecuali pada masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah mengubah konstelasi perekonomian global dan domestik akibat adanya restriksi mobilitas, sehingga berdampak pada penurunan permintaan domestik dan rendahnya capaian inflasi. Tren penurunan inflasi terjadi pada seluruh disagregasinya, baik kelompok inti, *administered prices* (AP), maupun *volatile foods* (VF). Demikian pula secara spasial, pencapaian inflasi di sebagian besar daerah juga tercatat berada pada level yang rendah. Pemerintah bersama Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi yang rendah dengan tren menurun dan sesuai dengan tingkat inflasi yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan yang berkelanjutan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 telah menetapkan sasaran inflasi pada periode 2022-2024 berturut-turut sebesar $3,0\% \pm 1,0\%$, $3,0\% \pm 1,0\%$, dan $2,5\% \pm 1,0\%$.

Secara umum, pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa program kerja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan karena menghadapi sejumlah kendala. Sebagian besar program kerja dalam strategi utama 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) telah dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga mendukung pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Terdapat beberapa program kerja yang terkendala, antara lain sebagai dampak penyesuaian prioritas karena adanya pandemi Covid-19 maupun karena masih belum optimalnya beberapa aspek di tataran perencanaan dan implementasi.

Upaya pengendalian inflasi ke depan masih menghadapi sejumlah tantangan, baik yang berasal dari faktor global maupun domestik. Dari sisi global, tekanan berasal dari tren kenaikan harga komoditas dan gangguan *supply chain* yang dapat mendorong kenaikan harga di dalam negeri, serta kemungkinan terjadinya normalisasi kebijakan moneter global yang dapat memberi tekanan dalam upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah. Dari sisi domestik, potensi tekanan diperkirakan berasal dari kenaikan permintaan seiring berlanjutnya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dampak likuiditas dari pembiayaan program PEN, serta upaya konsolidasi fiskal dan transformasi subsidi. Sementara itu, inflasi kelompok VF masih diwarnai oleh permasalahan struktural pangan domestik berupa disparitas harga antarwaktu dan antardaerah, khususnya pada komoditas hortikultura dan aneka ikan, di tengah terjadinya perubahan iklim.

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 disusun sebagai pedoman dalam kebijakan pengendalian inflasi ke depan, dengan mengambil tema "Akselerasi Perbaikan Struktural dengan Mendorong Adopsi Digital untuk Stabilitas Inflasi dan Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia Maju". Tema tersebut sejalan dengan arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021 untuk meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan dan naik kelas, serta meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi, penggunaan internet, *e-commerce*, dan platform digital meningkat signifikan selama masa pandemi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai momentum dalam mengintegrasikan pengembangan ekosistem sektor pertanian dari sisi hulu hingga hilir melalui adopsi teknologi secara *end-to-end*.



Struktur program kerja pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 mengacu pada strategi 4K. Strategi Keterjangkauan Harga ditujukan untuk menjaga koefisien variasi harga komoditas hasil pertanian dan tingkat volatilitas nilai tukar Rupiah. Strategi Ketersediaan Pasokan berupaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan, serta meningkatkan ketahanan pangan nasional. Strategi Kelancaran Distribusi bertujuan untuk menurunkan disparitas harga antardaerah dan antarwaktu. Adapun strategi Komunikasi Efektif berupaya untuk menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat pada sasaran, meningkatkan kualitas data dan sistem informasi untuk mendukung monitoring harga dan pasokan pangan nasional, serta meningkatkan kehandalan TPID dalam pencapaian inflasi daerah. Berdasarkan analisa gap terhadap strategi 4K tersebut, upaya pengendalian inflasi ke depan diprioritaskan pada strategi Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi, yang juga sejalan dengan arahan Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2021.

Implementasi strategi 4K dilaksanakan melalui beberapa program strategis dengan sejumlah program kerja. Strategi Keterjangkauan Harga dilakukan melalui program strategis Stabilisasi Harga dan Pengelolaan Permintaan, dengan program kerja antara lain *review* Harga Eceran Tertinggi (HET) dan/atau Harga Acuan Pembelian (HAP), stabilisasi

harga dan stok bahan pokok, optimalisasi Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), koordinasi penetapan komoditas AP, serta menjaga volatilitas nilai tukar dan keseimbangan internal perekonomian. Strategi Ketersediaan Pasokan dijabarkan melalui program strategis penguatan produksi dalam negeri, mekanisme ekspor-impor pangan, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan penguatan kelembagaan. Beberapa program kerja yang tercakup didalamnya antara lain perluasan adopsi *internet of things*, *food estate*, kampung hortikultura, pembangunan infrastruktur, penerapan praktik budidaya yang baik, penguatan cadangan beras dan komoditas pangan lainnya, diversifikasi negara asal impor, serta korporatisasi klaster petani dan fasilitasi kemitraan. Strategi Kelancaran Distribusi dilakukan melalui program strategis Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan infrastruktur perdagangan, dengan program kerja diantaranya perluasan KAD, fasilitasi distribusi pangan, pengembangan infrastruktur konektivitas dan digitalisasi sisi hilir. Adapun strategi Komunikasi Efektif terdiri dari program strategis perbaikan kualitas data, koordinasi pusat-daerah, dan pengelolaan ekspektasi. Beberapa program kerja yang tercakup di dalamnya antara lain penyediaan data dan sistem informasi harga dan stok pangan, peningkatan kehandalan TPID dan pelaksanaan bauran kebijakan yang kredibel melalui komunikasi yang rutin dan terpercaya.

BAB 1

LATAR BELAKANG



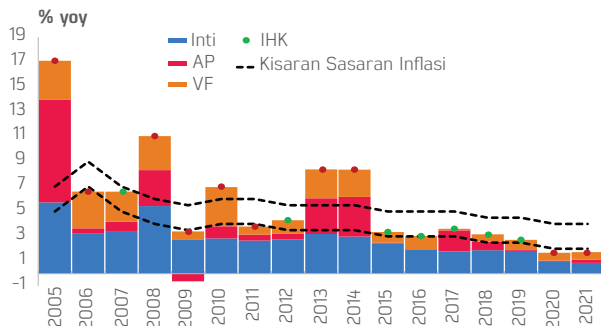


Latar Belakang Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024

CAPAIAN INFLASI MELANJUTKAN TREN PENURUNAN



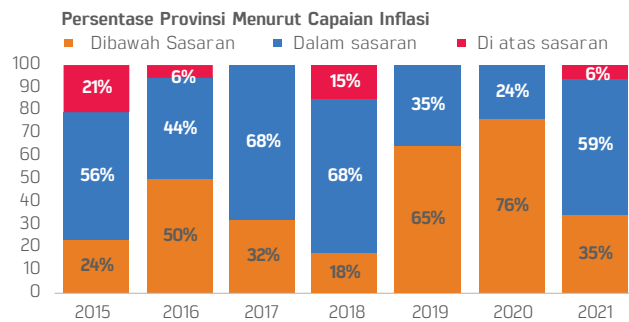
Inflasi dalam tren menurun



Inflasi IHK pada 2020 dan 2021 lebih rendah dari kisaran sasaran akibat pandemi Covid-19

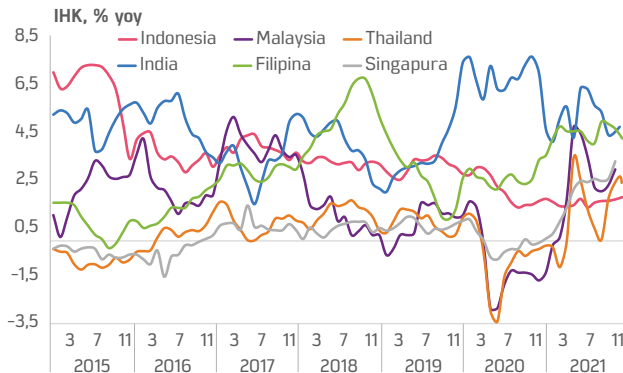
INTI	Des 2021	Avg very low regime
	1,56%	2,69%
VF	Des 2021	Avg low regime
	3,2%	4,82%
AP	Des 2021	Avg low regime
	1,79%	2,79%

Inflasi inti berada dalam rezim sangat rendah, VF dan AP dalam rezim rendah.

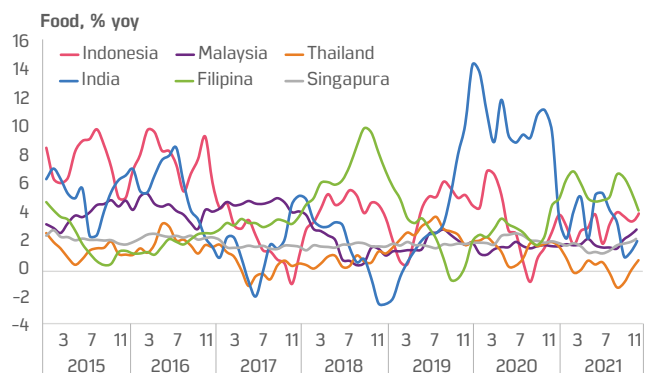


Secara umum dalam tiga tahun terakhir lebih banyak provinsi dengan realisasi inflasi dibawah kisaran sasaran, kecuali pada 2021

INFLASI IHK INDONESIA LEBIH RENDAH DARI KAWASAN, NAMUN INFLASI PANGAN MASIH RELATIF LEBIH TINGGI



Rerata inflasi IHK Indonesia dalam tiga tahun terakhir lebih rendah dari beberapa negara kawasan



Rerata inflasi pangan Indonesia dalam tiga tahun terakhir lebih tinggi dari beberapa negara kawasan

ARAHAN PRESIDEN RI DALAM RAKORNAS 2021

SINERGI PUSAT DAN DAERAH MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN MENJAGA STABILITAS HARGA

- Menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi di daerah.
- Fokus pada stabilitas harga dan mendorong sektor ekonomi tumbuh produktif, melalui peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan dan naik kelas.
- Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, a.l. melalui: i) penguatan kelembagaan (klasterisasi); ii) memperluas akses pemasaran (a.l. platform digital); iii) mengoptimalkan penyaluran KUR pertanian; dan iv) pendampingan intensif untuk meningkatkan produktivitas dan memotong rantai pemasaran.

LATAR BELAKANG

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Laju inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, inflasi yang rendah dan stabil sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga laju inflasi dengan menerapkan *Inflation Targeting Framework* (ITF) melalui penetapan sasaran inflasi (*nominal anchor*) sebagai acuan. Keberadaan ITF diharapkan dapat menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat luas, sehingga dapat mendukung kestabilan harga.

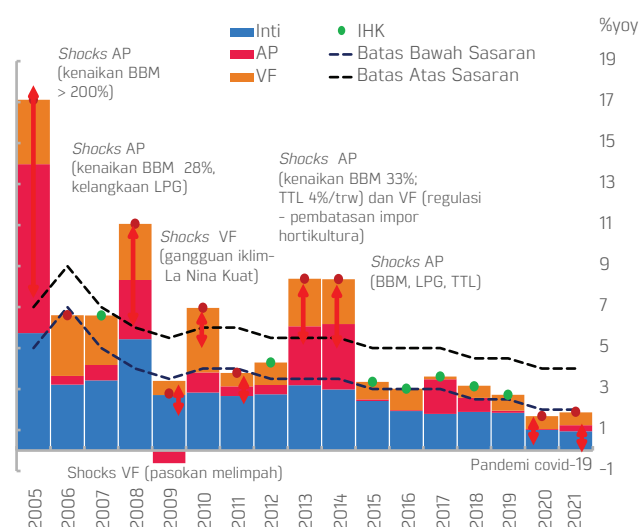
Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah mengubah konstelasi perekonomian global dan domestik.

Restriksi mobilitas untuk mengurangi penyebaran Covid-19 menyebabkan penurunan permintaan domestik sehingga berkontribusi pada rendahnya capaian inflasi. Pada tahun 2020 dan 2021, inflasi IHK Indonesia masing-masing tercatat sebesar 1,68% (yoy) dan 1,87% (yoy), berada di bawah kisaran sasaran inflasi 3,0%±1%. Adapun pada tahun 2019, inflasi IHK tercatat sebesar 2,72% (yoy), berada dalam kisaran sasaran inflasi sebesar 3,0±1%.

Rendahnya capaian inflasi pada masa pandemi Covid-19 bersumber dari seluruh disagregasinya.

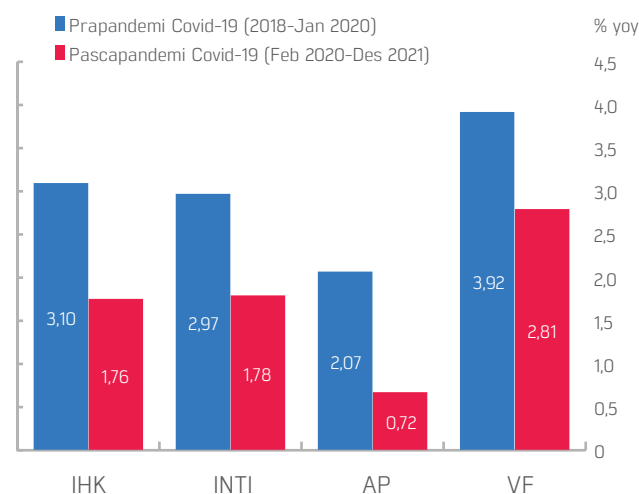
Inflasi IHK masa pandemi Covid-19, Februari 2020 s.d. Desember 2021, menunjukkan rata-rata sebesar 1,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian pra Covid-19, Januari 2018 s.d. Januari 2020, yakni sebesar 3,10% (yoy). Inflasi kelompok inti pada masa pandemi tercatat sebesar 1,78% (yoy), lebih rendah dari pra Covid-19 sejalan dengan permintaan yang masih lemah, ekspektasi inflasi yang menurun, transmisi dampak eksternal yang terbatas, dan rendahnya dampak lanjutan inflasi kelompok *administered prices* (AP) dan *volatile food* (VF). Inflasi kelompok AP dan VF pada masa pandemi Covid-19 juga lebih rendah, masing-masing mencapai 0,72% (yoy) dan 2,81% (yoy) sejalan dengan permintaan dan mobilitas yang terbatas, di tengah pasokan dan distribusi pangan yang terkendali, cuaca yang relatif kondusif, dan minimalnya penyesuaian harga energi oleh Pemerintah.

Secara spasial, inflasi tetap terjaga meski masih menghadapi sejumlah tantangan. Sejalan dengan capaian inflasi nasional, inflasi di sebagian besar daerah juga berada pada level yang rendah. Hingga data per 2021, sebanyak 12 provinsi mencatat inflasi di bawah kisaran sasaran 3,0±1%. Disparitas inflasi IHK antardaerah selama tahun 2019-2021 secara rata-rata menyempit dibandingkan periode 2016-2018. Meskipun demikian, disparitas inflasi VF pada 2020 dan 2021 cenderung melebar jika dibandingkan dengan 2019 sehingga perlu menjadi perhatian. Koordinasi yang erat antara Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga), Pemerintah Daerah (TPID), serta Bank Indonesia perlu terus diperkuat untuk dapat menjaga terkendalinya inflasi di tengah tantangan disparitas antardaerah yang masih cukup tinggi.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.1. Inflasi dan Sasaran

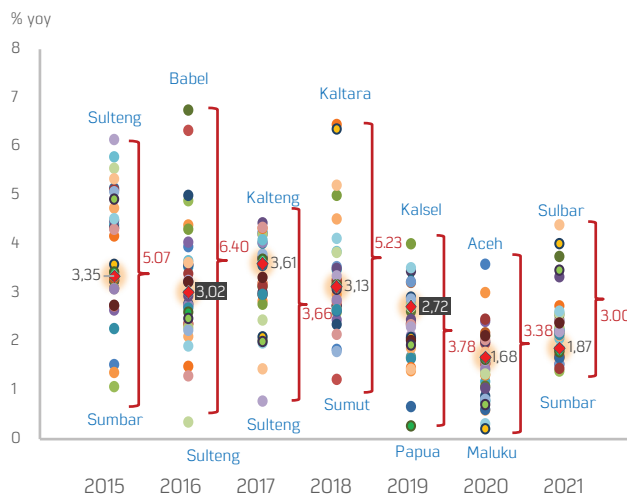


Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.2. Inflasi Pra dan Pasca Covid-19

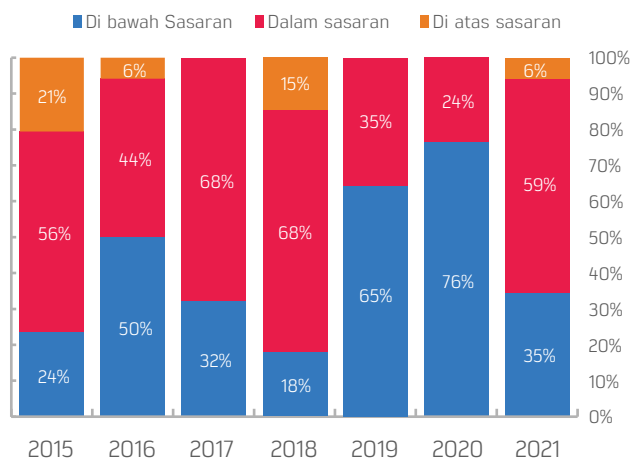
Volatilitas inflasi IHK Indonesia lebih rendah dibandingkan negara berkembang di kawasan. Selama tiga tahun terakhir, yaitu 2019-2021, inflasi IHK Indonesia secara rerata mencapai 2,21% (yoy) dengan standar deviasi sebesar 0,75%. Capaian inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura yang masing-masing sebesar 0,37% (yoy), 0,60% (yoy), dan 0,81% (yoy), serta lebih rendah dari India (5,15%, yoy) dan Filipina (3,17%, yoy).¹ Selain itu, inflasi kelima negara di kawasan tersebut memiliki fluktuasi yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia, dengan standar deviasi dalam kisaran 1,05-1,89.

Namun demikian, tingkat dan volatilitas inflasi pangan Indonesia masih lebih tinggi. Inflasi pangan Indonesia secara rerata sebesar 3,13% (yoy) dengan volatilitas sebesar 1,86% dalam tiga tahun terakhir. Capaian tersebut lebih tinggi



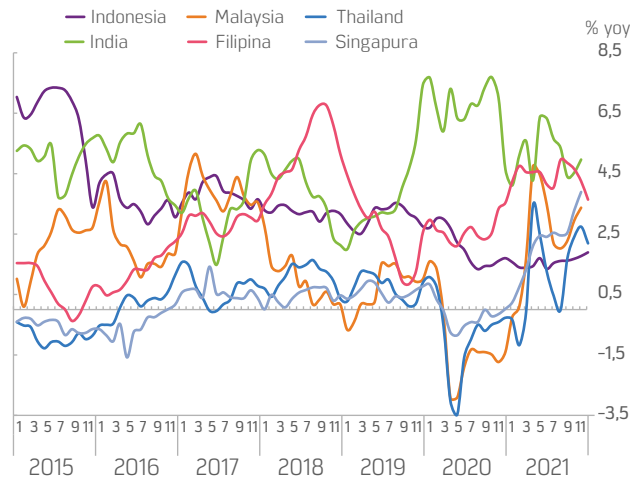
Grafik 1.4. Disparitas Inflasi Spasial

1 Realisasi inflasi India, Malaysia, dan Singapura s.d. November 2021

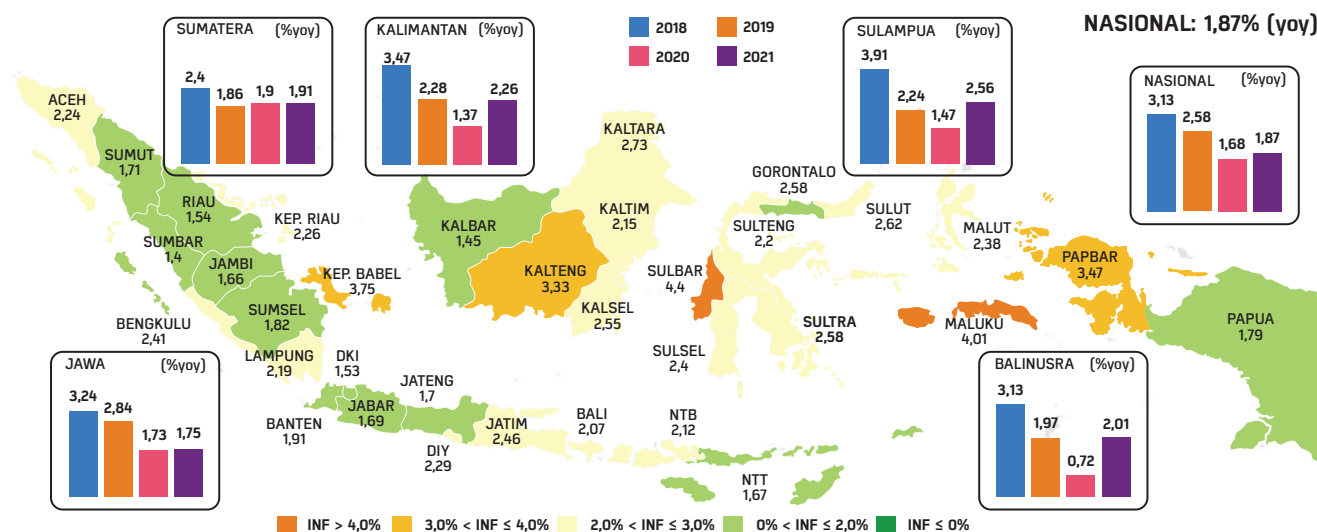


Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.3. Persentase Provinsi Menurut Capaian Inflasi

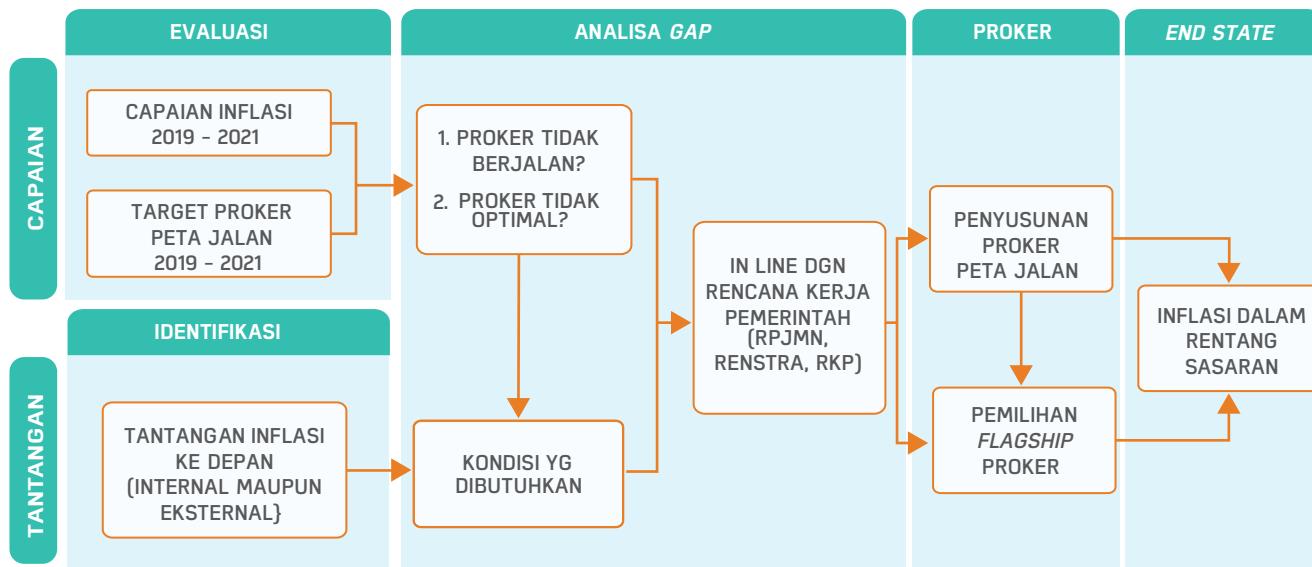


Grafik 1.5. Inflasi IHK di Kawasan



Sumber: BPS, diolah

Gambar 1.1. Inflasi Spasial, Desember 2021



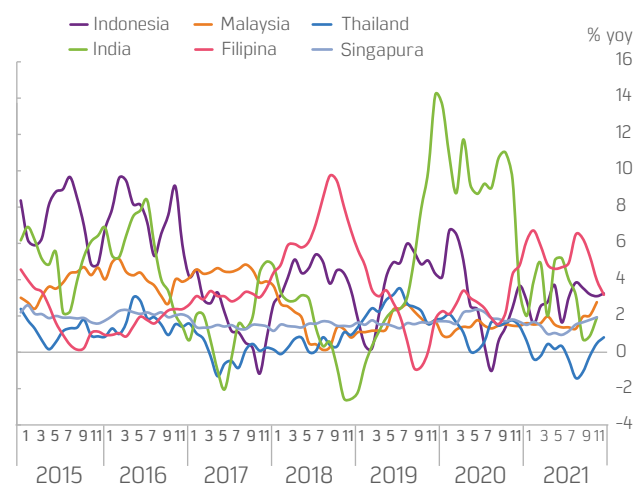
Gambar 1.2. Framework Penyusunan Peta Jalan 2022-2024

dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura. Masih tingginya inflasi pangan di Indonesia didorong oleh ketidakseimbangan produksi antarwaktu, antarwilayah, tantangan infrastruktur dalam mendukung distribusi pangan, dan preferensi pola konsumsi pangan masyarakat.

Sejumlah risiko berpotensi meningkatkan tekanan inflasi ke depan seiring dengan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19. Laju inflasi ke depan, terutama pada tahun 2022 dan 2023 diprakirakan meningkat sebagai respon pemulihan ekonomi pascapandemi. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akomodatif diharapkan dapat mendorong produksi di berbagai sektor ekonomi, serta meningkatkan permintaan domestik di tengah tekanan harga energi. Untuk itu, kebijakan pengendalian inflasi, *exit policy*, koordinasi, serta komunikasi kebijakan yang tepat sangat diperlukan untuk dapat meminimalkan tekanan inflasi ke depan.

Pemerintah bersama Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi yang rendah dengan tren menurun dan sesuai dengan tingkat inflasi yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 telah ditetapkan sasaran inflasi pada periode 2022 s.d 2024 berturut-turut sebesar $3,0\% \pm 1\%$, $3,0\% \pm 1\%$, dan $2,5\% \pm 1\%$.

Sejalan dengan penetapan sasaran inflasi tersebut dan amanat dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 148 Tahun 2017, perlu disusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi sebagai acuan dalam pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi 2022-2024.



Sumber: CEIC, diolah

Grafik 1.6. Inflasi Pangan di Kawasan

Penyusunan panduan ini merujuk dan mempertimbangkan hasil evaluasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi periode 2019-2021. Selain itu, proses penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Strategis (Renstra) K/L Anggota TPIP, sehingga program kerja yang dirancang diharapkan telah sejalan dengan target dan rencana kerja pemerintah. Target pelaksanaan program kerja 2022-2024 juga diupayakan disusun secara kuantitatif untuk mempermudah monitoring dan evaluasi.



Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 juga telah mengakomodasi arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021.

Pada Rakornas tersebut, Presiden menekankan tiga hal penting dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung proses pemulihan ekonomi, yaitu (i) Menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama barang kebutuhan pokok, dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang terjadi di daerah, (ii) Melanjutkan upaya yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga, tetapi juga secara proaktif mendorong sektor ekonomi untuk semakin tumbuh dan produktif, melalui upaya mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta memperkuat kapasitas sektor UMKM agar mampu bertahan dan dapat naik kelas, dan (iii) Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak hanya berhenti pada upaya meningkatkan Nilai Tukar Petani, dengan strategi penguatan kelembagaan petani melalui pengembangan klusterisasi, perluasan akses pemasaran melalui platform digital, optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penguatan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha pertanian untuk mendorong peningkatan produktivitas petani dan memperpendek mata rantai pemasaran.

Sejalan dengan arahan Presiden tersebut, akselerasi perbaikan struktural melalui digitalisasi menjadi fokus utama pengendalian inflasi jangka menengah.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dan *e-commerce* semakin meningkat terutama pascapandemi seiring pembatasan mobilitas sosial. Di sisi lain, kebutuhan pangan diperkirakan terus meningkat seiring dengan penambahan penduduk dan meningkatnya *middle income class*. Namun demikian, berbagai permasalahan struktural masih mengemuka seperti produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan yang masih rendah dengan rantai pasok yang panjang di tengah isu perubahan iklim global. Oleh karena itu, adopsi teknologi digital di sisi hulu maupun hilir diperlukan dalam menjaga stabilitas inflasi pangan dan inflasi IHK. Untuk itu, Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 disusun dengan mengambil tema "Akselerasi Perbaikan Struktural dengan Mendorong Adopsi Digital untuk Stabilitas Inflasi dan Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia Maju".

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB 2

EVALUASI PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2019-2021





Evaluasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021

Inflasi IHK berada pada rentang sasaran, kecuali pada periode pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021

	Sasaran*	Realisasi			
	IHK	IHK	Inti	Volatile Food	Administered Prices
2019	3,5%±1%	2,72%	3,02%	4,30%	0,51%
2020	3,0%±1%	1,68%	1,60%	3,62%	0,25%
2021	3,0%±1%	1,87%	1,56%	3,20%	1,79%

*Sesuai dengan PMK No.124/PMK.010/2017



INFLASI INTI 

“Tren inflasi inti menurun”



INFLASI VOLATILE FOOD 

“Inflasi *volatile food* fluktuatif, masih dipengaruhi permasalahan struktural”



INFLASI ADMINISTERED PRICES 

“Inflasi *administered prices* terjaga rendah”

Capaian Peta Jalan 2019-2021

- **Perkembangan Inflasi.** Inflasi inti stabil, namun terus menurun sejak pandemi seiring mobilitas dan perekonomian yang melambat.
- **Demand.** Inflasi inti mencatat angka terendah selama pandemi seiring permintaan dan ekspektasi inflasi yang terus menurun.
- **Supply.** Inflasi inti ditopang oleh penawaran yang terjaga. Inflasi VF berpengaruh terhadap inti walau musiman. Fluktuasi harga global ditransmisikan terbatas ke inflasi inti.

- **Perkembangan inflasi.** Inflasi VF menurun dan pada akhir periode berada dalam kisaran sasaran. Namun demikian, fluktuasi inflasi VF tetap tinggi, terutama didorong oleh komoditas hortikultura.
- **Demand.** Pelemahan permintaan, terutama Horeca, berdampak pada anjloknya harga bahan pangan di awal pandemi.
- **Supply.** Pasokan relatif terjaga secara tahunan, namun produksi domestik yang tergantung pada cuaca dan pola tanam yang masih tradisional menyebabkan terjadinya kendala pasokan secara bulanan. Selain itu, kebijakan impor yang tepat jumlah dan tepat waktu perlu dijaga keberlanjutannya.

- **Perkembangan inflasi.** Inflasi AP terjaga rendah didukung relatif minimnya penyesuaian harga energi oleh Pemerintah, serta daya beli yang melambat.
- **Demand.** Pelemahan permintaan seiring terbatasnya mobilitas akibat pandemi terutama tercermin dari perkembangan inflasi kelompok angkutan.
- **Kebijakan Pemerintah.** Inflasi rokok meningkat saat kenaikan tarif cukai cukup tinggi, meski kemudian melambat seiring transmisi cukai oleh produsen yang terbatas dan gradual akibat lemahnya daya beli masyarakat selama pandemi. Kebijakan penyesuaian harga energi oleh Pemerintah cenderung minim, TTL dan harga BBM nonsubsidi bahkan diturunkan saat awal pandemi untuk menjaga daya beli.

Lessons Learned

- **Supply** perlu dijaga dengan didukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi agar tidak terjadi tekanan inflasi saat *demand* meningkat.
- Ekspektasi inflasi menurun seiring realisasi inflasi yang rendah.
- Stabilitas nilai tukar perlu terus dijaga untuk mempertahankan ekspektasi pelaku ekonomi.

- Harga pangan yang menurun khususnya hortikultura, berisiko menyebabkan disinsentif produksi petani.
- Fluktuasi didorong faktor cuaca dan kendala struktural (a.l. pola tanam dan infrastruktur) yang menyebabkan masih terjadinya disparitas harga antarwaktu dan antarwilayah.
- Perlunya menjaga konsistensi kebijakan impor tepat waktu dan tepat jumlah.

- Perbaikan permintaan dan mobilitas berpotensi meningkatkan inflasi AP.
- Reformasi fiskal, termasuk transformasi subsidi, di tengah meningkatnya deviasi harga jual dan harga keekonomian energi akan menambah tekanan inflasi AP.
- Perlunya mempertahankan stabilitas harga energi untuk mendukung stabilitas inflasi (*supply side*).

Evaluasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021



CAPAIAN PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2019-2021

Secara umum, program kerja pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 dalam strategi utama Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) telah terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan.



TANTANGAN IMPLEMENTASI PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2019-2021

- Beberapa program kerja belum berjalan sesuai target yang ditetapkan, antara lain sebagai dampak penyesuaian prioritas karena adanya pandemi Covid-19 maupun karena masih belum optimalnya beberapa aspek di tataran perencanaan dan implementasi.
- Penggunaan teknologi informasi dalam proses produksi belum maksimal.
- Proses importasi bahan pangan strategis belum sepenuhnya tepat waktu dan efisien.

K 1 : KETERJANGKAUAN HARGA

STABILISASI HARGA

- Menerbitkan peraturan tentang sinkronisasi anggaran pengendalian inflasi
- Optimalisasi Pasar Murah/Operasi Pasar bahan pangan strategis
- Menjaga volatilitas nilai tukar

MENGELOLA PERMINTAAN

- Menjaga keseimbangan internal perekonomian
- Sosialisasi diversifikasi konsumsi bahan makanan

K 2 : KETERSEDIAAN PASOKAN

PRODUKSI, CPP, EKSIM

- Peningkatan produksi domestik melalui optimalisasi sarana produksi, perbaikan sistem budidaya, pembangunan irigasi, peningkatan investasi dan infrastruktur
- Penguatan cadangan pangan (tingkat CBP dan diversifikasi komoditas)
- Penguatan pengelolaan impor-ekspor

MEMPERKUAT KELEMBAGAAN

- Penyesuaian asuransi tani, pemanfaatan SRG dan KUR, perluasan kartu tani
- Memperkuat pasokan bahan bakar dengan non BBM

K 3 : KELANCARAN DISTRIBUSI

MENDORONG KAD

- Pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antardaerah dan fasilitasi kerja sama antardaerah

MEMPERKUAT KELEMBAGAAN

- Membentuk *innovation lab* dan mendorong UMKM untuk memanfaatkan platform *digital farming*
- Pembangunan PIB dan sarana konektivitasnya di sentra produksi

K 4 : KOMUNIKASI EFEKTIF

MEMPERBAIKI KUALITAS DATA

- Penyusunan kebijakan satu peta lahan pertanian
- Peningkatan kualitas data PIHPS (korelasi dengan data realisasi) dan perluasan data stok
- Perbaikan kualitas statistik inflasi pangan dan barang strategis

KOORDINASI PUSAT-DAERAH

- Menetapkan kebijakan AP yang sesuai dengan sasaran inflasi IHK
- Melakukan pembinaan TPID

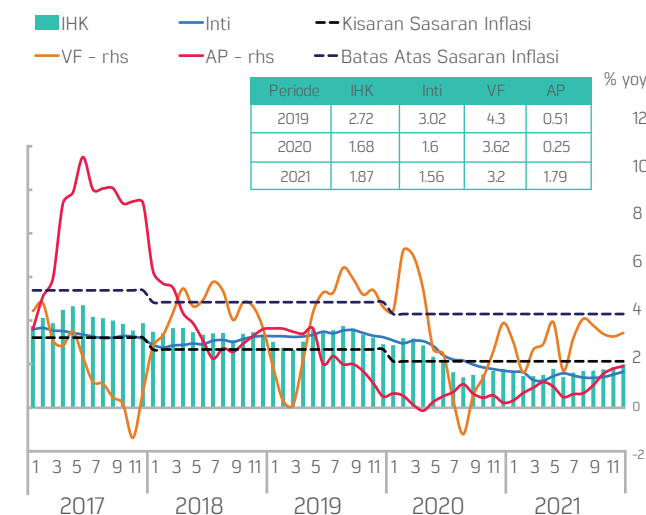
EVALUASI PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2019-2021

2.1. Evaluasi Pencapaian Inflasi 2019-2021

Laju inflasi berhasil dijaga pada rentang sasarnya, terkecuali selama masa pandemi Covid-19. Realisasi inflasi selama periode 2019-2021 masing-masing tercatat sebesar 2,72% (yoy), 1,68%, dan 1,87% (yoy). Pencapaian realisasi inflasi 2019 berada pada kisaran sasaran yang ditetapkan sebesar 3,5%±1%, namun capaian pada 2020 dan 2021 berada di bawah kisaran sasaran yang ditetapkan sebesar 3,0%±1% sebagai dampak dari permintaan yang terbatas akibat pandemi Covid-19.

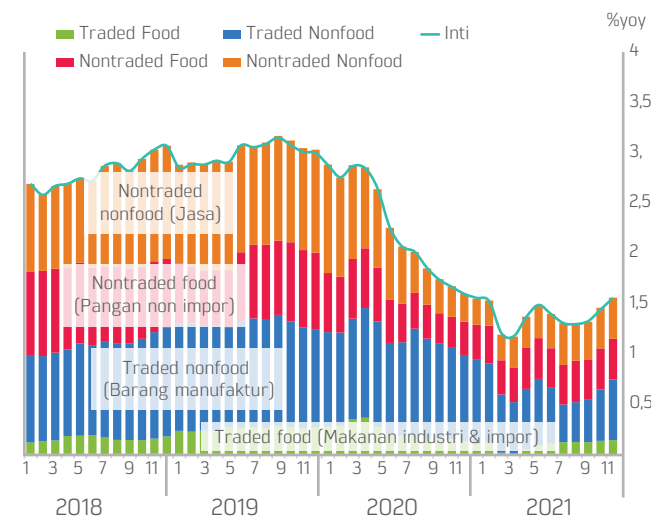
Terkendalinya inflasi IHK dipengaruhi oleh menurunnya inflasi kelompok inti, AP, dan VF dalam tiga tahun terakhir. Kondisi tersebut didukung oleh terkelolanya faktor domestik termasuk terjaganya ekspektasi inflasi, di tengah transmisi tekanan eksternal yang terbatas. Capaian tersebut juga tidak terlepas dari koordinasi yang solid diantara seluruh stakeholders, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Inflasi inti terpantau rendah dan mengalami penurunan selama 2019-2021 sejalan dengan rendahnya permintaan dan ekspektasi inflasi khususnya selama pandemi Covid-19. Pada 2019, inflasi inti tercatat sebesar 3,02% (yoy), lalu menurun menjadi 1,60% (yoy) dan 1,56% (yoy) pada 2020 dan 2021. Rendahnya inflasi inti selama pandemi Covid-19 terutama terjadi pada kelompok jasa yang menurun lebih dalam dibandingkan kelompok barang. Secara umum, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang masih lemah dan terbatasnya aktivitas ekonomi akibat diberlakukannya berbagai pembatasan kegiatan masyarakat pada tahun 2020 dan 2021 (yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/PPKM). Di sisi lain, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan dapat terjaga dengan baik meskipun terdapat pemberlakuan restriksi mobilitas masyarakat tersebut. Relaksasi PPKM yang mulai dilakukan pada triwulan III 2021 telah meningkatkan mobilitas masyarakat namun daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, sehingga inflasi inti masih relatif rendah. Selain itu, ekspektasi inflasi yang menurun diperkirakan juga berpengaruh pada capaian inflasi inti yang masih rendah.



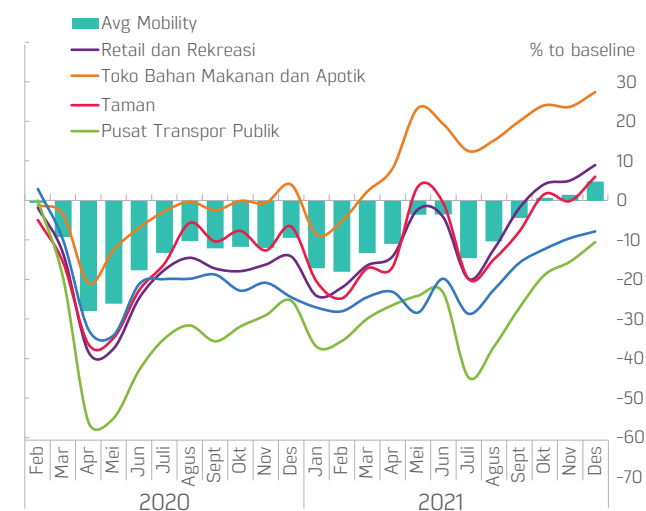
Sumber: BPS

Grafik 2.1. Perkembangan Realisasi Inflasi



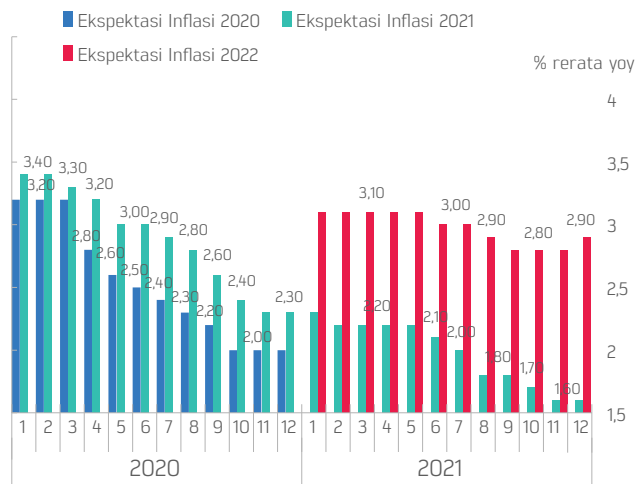
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.2. Sumbangan Inflasi Inti Berdasarkan Kelompok Komoditas



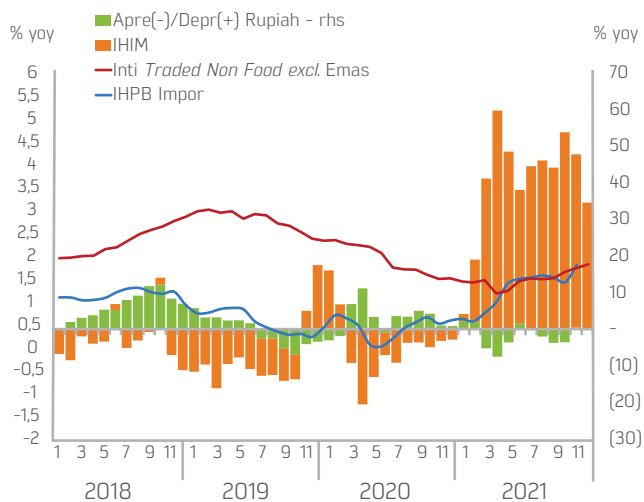
Sumber: Google Mobility Trend

Grafik 2.3. Mobilitas Penduduk

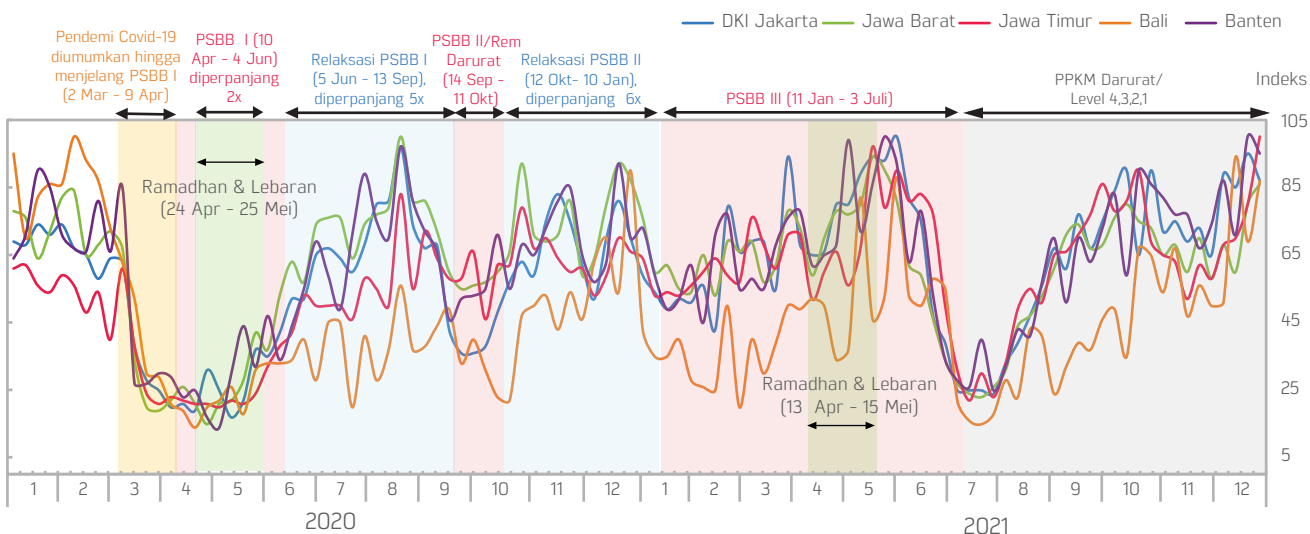


Sumber: Consensus Economics

Grafik 2.4. Ekspektasi Inflasi



Grafik 2.5. Tekanan Eksternal



Sumber: Google

Grafik 2.6. Mobilitas Sektor Kafe/Restoran

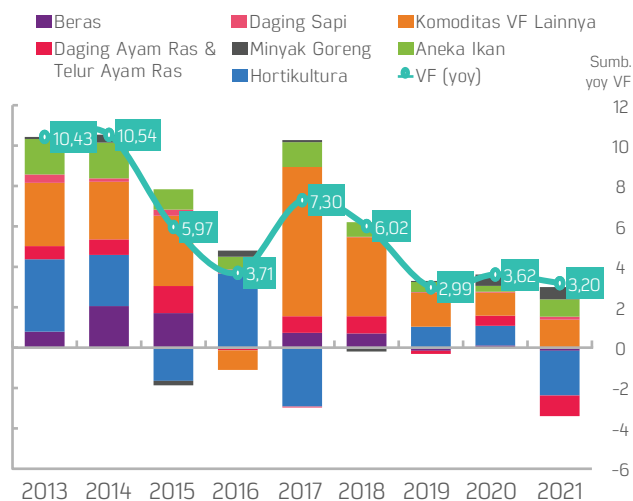
Terbatasnya transmisi tekanan eksternal, di tengah terjaganya pasokan dan distribusi komoditas pangan serta minimalnya penyesuaian harga komoditas energi, mendorong rendahnya inflasi inti. Harga komoditas global, baik energi dan non energi, dalam tren meningkat pada 2021 terutama sebagai dampak dari pemulihan ekonomi global. Kenaikan harga komoditas global tersebut meningkatkan tekanan harga input di level produsen dan pedagang. Namun demikian, transmisi kenaikan harga komoditas global terhadap inflasi domestik relatif terbatas seiring dengan daya beli masyarakat yang belum kuat, margin produsen yang masih mencukupi, serta upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan harga energi domestik.

Inflasi kelompok VF terkendali dan berada dalam tren menurun selama 2019-2021. Pada 2019, inflasi VF masih berada dalam level yang tinggi yaitu sebesar 4,30% (yoy), kemudian menurun menjadi 3,62% (yoy), dan 3,20% (yoy) pada 2020 dan 2021. Terkendalinya inflasi VF ditopang oleh terjaganya ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan, seiring dengan cuaca yang relatif kondusif sehingga mendukung produksi pangan.

Inflasi kelompok VF yang terkendali didukung oleh berbagai kebijakan stabilisasi harga oleh Pemerintah di tengah permintaan yang masih terbatas. Selama masa pandemi Covid-19, permintaan pangan, khususnya dari sektor horeka, menurun cukup signifikan seiring diberlakukannya berbagai episode pembatasan mobilitas termasuk larangan *dine-in*. Kondisi ini turut berkontribusi pada terjaganya inflasi VF. Selain itu, berbagai kebijakan stabilisasi harga yang dilakukan oleh Pemerintah, seperti program Ketersediaan

Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) beras serta program *culling dan cutting* pada komoditas daging dan telur ayam ras, juga turut mendukung stabilitas inflasi kelompok VF.

Terkendalnya inflasi VF terutama bersumber dari inflasi beras yang stabil seiring dengan pasokan yang terjaga dan pelaksanaan program KPSH. Komoditas beras memiliki bobot inflasi yang tertinggi pada keranjang IHK dibandingkan komoditas pangan lain, sehingga stabilnya inflasi beras turut berkontribusi pada terkendalnya inflasi VF. Di sisi lain, inflasi daging sapi dan minyak goreng cenderung meningkat terutama pada 2021 seiring dengan kenaikan harga daging sapi dan CPO global. Sementara itu, pengendalian inflasi hortikultura masih menghadapi sejumlah tantangan seiring sifatnya yang *perishable* dan kentalnya pola siklikal antarwaktu.



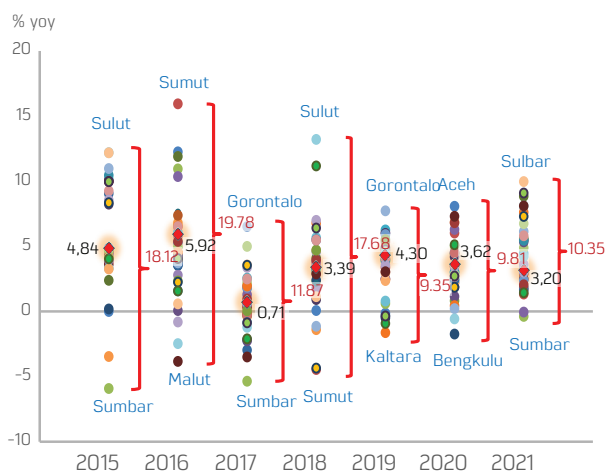
Sumber: BPS

Grafik 2.7. Sumbangan Inflasi VF Berdasarkan Komoditas

Dinamika inflasi VF masih dipengaruhi oleh gangguan cuaca awal tahun (La Nina) yang mengganggu proses produksi dan kendala struktural VF yang masih belum teratasi dengan baik. Kendala struktural tersebut disebabkan oleh perencanaan pola tanam yang dipengaruhi dinamika cuaca dan sentra pangan yang masih terkonsentrasi di Jawa. Kondisi tersebut menyebabkan disparitas antarwaktu dan antarwilayah yang masih menjadi tantangan dalam menjaga kesinambungan produksi pangan nasional.

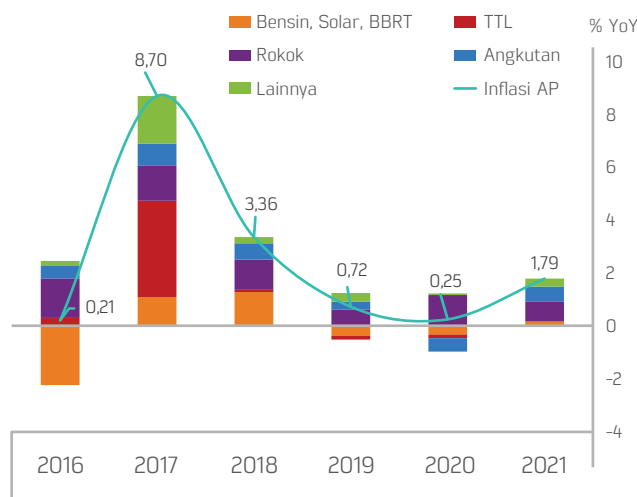
Inflasi kelompok AP terjaga rendah sepanjang 2019-2021 seiring dengan upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan harga energi domestik. Capaian inflasi AP selama 3 tahun berturut-turut tercatat sebesar 0,51%, 0,25%, dan 1,79% (yoy). Rendahnya inflasi AP terutama sejak akhir 2019 dipengaruhi oleh deflasi komoditas energi seiring penurunan harga

Bahan Bakar Khusus (BBK) yang berlanjut hingga awal 2020. Selain itu, Pemerintah juga memberikan diskon Tarif Tenaga Listrik (TTL) sejak triwulan akhir 2020 sebagai salah satu program perlindungan sosial dalam PEN, sehingga semakin mendorong deflasi komoditas energi. Pada 2021, di tengah tekanan kenaikan harga energi global, Pemerintah masih mempertahankan harga jual komoditas energi, khususnya untuk komoditas subsidi, guna mendukung upaya pemulihan daya beli masyarakat yang masih belum kuat. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian untuk BBK jenis Pertamina Turbo dan Pertamina Dex pada September 2021.



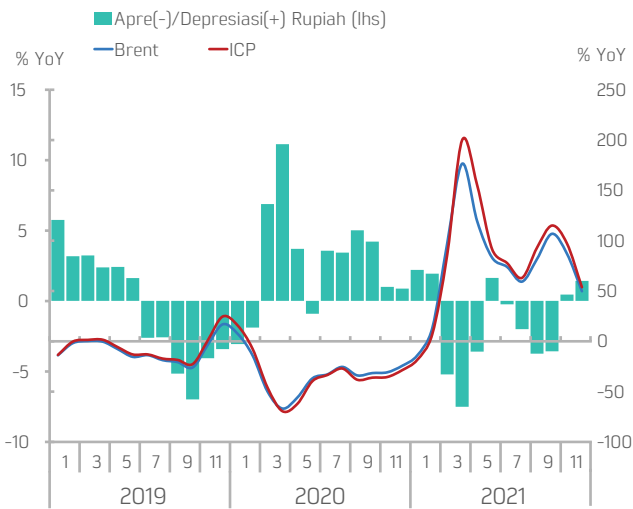
Sumber: BPS, Diolah.

Grafik 2.8. Disparitas Inflasi VF Spasial



Sumber: BPS

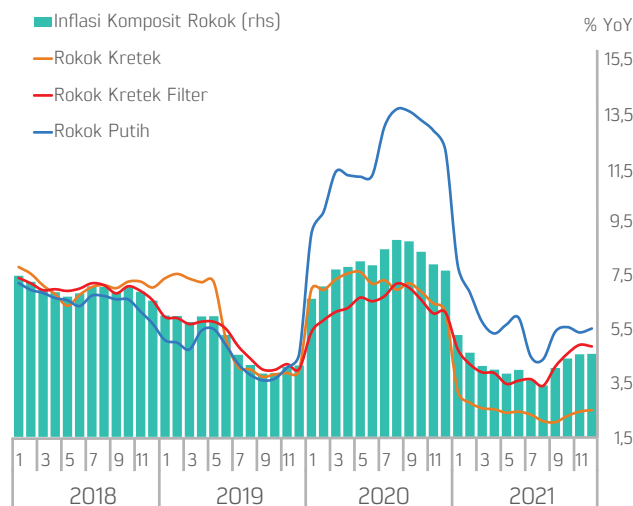
Grafik 2.9. Sumbangan Inflasi AP



Sumber: Kementerian ESDM, BI, Bloomberg

Grafik 2.10. Perkembangan Determinan Harga Energi

Di tengah minimnya penyesuaian harga energi, capaian inflasi AP pada masa pandemi Covid-19 lebih didominasi oleh faktor mobilitas dan permintaan, serta kebijakan terkait tarif cukai hasil tembakau. Inflasi rokok memberikan sumbangan cukup besar selama 2020 seiring kenaikan tarif cukai yang tinggi (23%), namun pada 2021 melambat seiring kenaikan tarif cukai yang lebih rendah (12,5%). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh masih lemahnya konsumsi masyarakat selama pandemi, sehingga mendorong produsen rokok mentransmisikan tarif cukai secara gradual dan terbatas.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.11. Perkembangan Inflasi Rokok

Inflasi aneka angkutan khususnya komoditas angkutan udara terjaga rendah seiring rendahnya permintaan dan terbatasnya mobilitas. Secara tahunan, inflasi komoditas angkutan udara mengalami deflasi sejak Desember 2019, dipengaruhi oleh strategi penerapan harga tiket murah oleh

maskapai untuk menjaga tingkat keterisian penumpang selama masa pandemi Covid-19. Meski mobilitas masyarakat mulai menunjukkan peningkatan menjelang akhir 2021, namun persyaratan perjalanan antarwilayah yang masih ketat menyebabkan perbaikan mobilitas udara juga cenderung masih relatif terbatas.

2.2. Evaluasi Pencapaian Program Kerja 2019-2021

Secara umum, program kerja pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 dalam strategi utama Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) telah terlaksana dengan baik, meskipun terdapat beberapa program kerja yang mengalami kendala. Sebagian besar program kerja telah dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, terdapat beberapa program kerja yang belum berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, antara lain sebagai dampak penyesuaian prioritas karena adanya pandemi Covid-19 maupun karena masih belum optimalnya beberapa aspek di tataran perencanaan dan implementasi.

2.2.1. Keterjangkauan Harga (K1)

Sejumlah program kerja telah dilaksanakan dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mengelola permintaan. Upaya sinkronisasi berbagai program kerja dan evaluasi capaian terkait pengendalian inflasi yang terdapat di berbagai K/L dilakukan melalui penerbitan sejumlah aturan, antara lain (i) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup tata cara perencanaan, sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi, serta pembentukan tim sinkronisasi perencanaan kebijakan pengendalian inflasi (SPKPI); (ii) Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.90/M.PPN/HK/10/2020 mengenai Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi (SPKPI); serta (iii) Petunjuk Pelaksanaan Nomor 3/ Juklak/Sesmen/03/2021 tentang Penandaan (*Tagging*) Kebijakan Pengendalian Inflasi Kementerian PPN/Bappenas.

Pelaksanaan program kerja Operasi Pasar dilakukan untuk mendukung keterjangkauan harga khususnya komoditas pangan strategis. Upaya untuk memperkuat penyaluran komoditas pangan strategis, khususnya beras, dilakukan dengan reformulasi program Operasi Pasar (OP) menjadi KPSH beras melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk KPSH. Selain itu, Kementerian

Perdagangan dan Perum BULOG telah melaksanakan OP komoditas pangan strategis lainnya (a.l. gula pasir dan minyak goreng) secara berkesinambungan untuk mencegah dan menangani gejala harga serta memastikan ketersediaan pasokan. Penyaluran KPSH beras oleh Perum BULOG dilakukan secara berkala dan tercatat masing-masing sebesar 617.617 ton, 1.026.662 ton, dan 768.789 ton pada 2019, 2020, dan 2021.

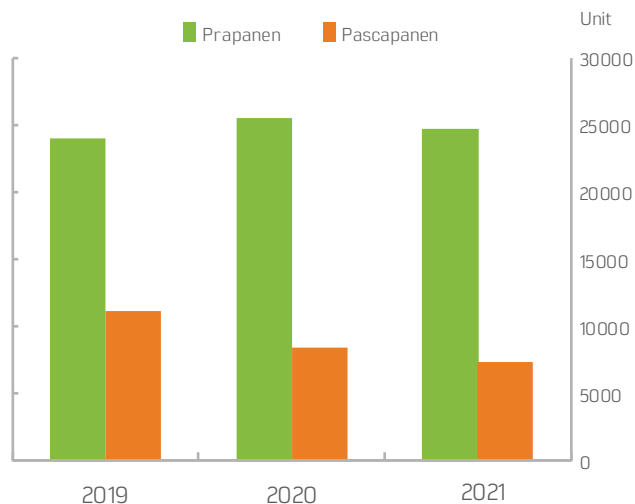
Upaya menjaga keterjangkauan harga juga dilakukan melalui stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk meminimalisir dampak eksternal terhadap inflasi domestik. Secara umum, nilai tukar Rupiah terjaga dengan baik sejalan dengan fundamental perekonomian dan mekanisme pasar. Secara tahunan, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat mengalami apresiasi sebesar 0,67% (yoy)² pada 2019, kemudian terdepresiasi sebesar 2,80% (yoy) pada 2020 terutama akibat penyesuaian aliran modal asing saat awal pandemi Covid-19. Namun demikian, nilai tukar Rupiah kembali mengalami apresiasi sebesar 1,64% (yoy) pada 2021 seiring adanya optimisme pemulihan ekonomi Indonesia. Berbagai upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah telah dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu melalui penerapan strategi *triple intervention*, pendalaman pasar keuangan, serta penguatan *second line of defense* dalam rangka mendukung tersedianya cadangan devisa yang memadai.

Selain itu, stabilisasi harga dilakukan melalui upaya menjaga keseimbangan internal perekonomian dengan mengelola permintaan. Di sisi moneter, langkah tersebut ditempuh melalui bauran kebijakan akomodatif berupa penurunan suku bunga kebijakan, di tengah permintaan yang menurun di masa pandemi dan *negative output gap* yang melebar. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan injeksi likuiditas (*quantitative easing*) di perbankan selama pandemi dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dan ekspansi moneter. Di sisi fiskal, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya antara lain melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi belanja subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan fokus pada program produktif. Perluasan belanja bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan juga dilakukan untuk menjangkau penduduk yang terdampak pandemi sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.

2 Realisasi merupakan perbandingan rerata bulanan setiap tahun dibandingkan rerata bulanan tahun sebelumnya

2.2.2. Ketersediaan Pasokan (K2)

Upaya menjaga ketersediaan pasokan diantaranya dilakukan melalui optimalisasi sarana produksi untuk memperkuat produksi domestik. Untuk itu, Kementerian Pertanian telah menerapkan mekanisasi penggunaan alat dan mesin pertanian yang berhubungan langsung dengan budidaya produksi pertanian (*on farm*), maupun pascapanen (*off farm*). Adapun bantuan sarana produksi mencakup benih, pupuk, dan alsintan yang didukung oleh pembangunan Unit Pengembangan Jasa Alsintan (UPJA) di daerah sentra produksi oleh Pemerintah Daerah.

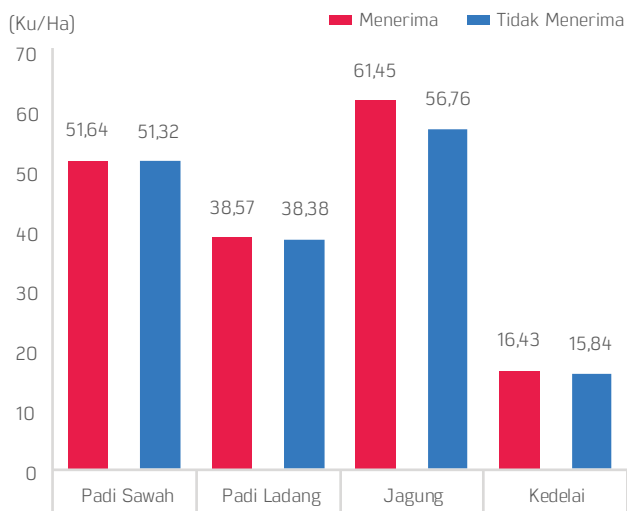


Sumber: Kementan

Grafik 2.12. Bantuan Alsintan Prapanen dan Pascapanen

Pada tahun 2019, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang disalurkan untuk prapanen sebesar 24.012 unit dan pascapanen sebesar 11.157 unit. Pada tahun 2020, penyaluran bantuan alsintan prapanen tetap tinggi dan meningkat menjadi 25.529 unit, sementara alsintan pascapanen sedikit menurun sebesar 8.466 unit. Pada 2021, realisasi alsintan prapanen sebesar 25.134 unit dan pascapanen sebesar 7.992 unit.

Penguatan produksi domestik juga didukung upaya memperbaiki kendala struktural, khususnya akibat perbedaan pola tanam. Kementerian Pertanian telah melakukan perbaikan sistem budidaya (kalender tanam) untuk komoditas bawang merah dan aneka cabai dengan pola tanam setiap tahun berdasarkan perkiraan kebutuhan pelaku antarwaktu (per bulan) dan antarwilayah (per kabupaten atau per provinsi), termasuk pengembangan kawasan tanam. Pada tahun 2020, pengembangan kawasan cabai mencapai 5.095 Ha, kemudian pada 2021 mencapai 4.530 Ha. Sementara itu, luas kawasan bawang merah meningkat dari 3.000 Ha pada 2020 menjadi 3.181 Ha pada 2021. Perbaikan sistem budidaya dapat mendukung penyediaan informasi



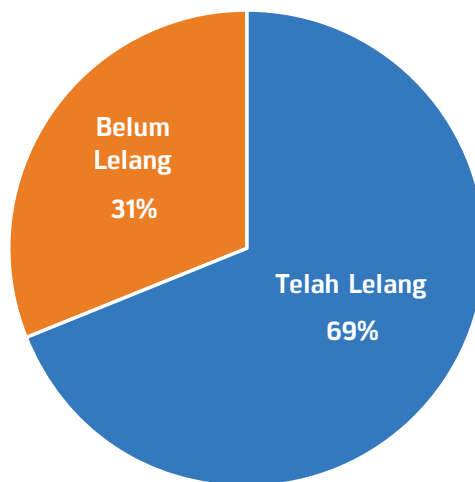
Sumber: BPS (Publikasi Analisis Produktivitas Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2020)

Grafik 2.13. Produktivitas Menurut Penggunaan Mesin Pertanian

target produksi yang harus dipenuhi dan luas tanam yang harus tersedia setiap bulan. Selanjutnya, informasi produksi dan luas tanam tersebut digunakan sebagai *Early Warning System* (EWS) ketersediaan komoditas aneka cabai dan bawang merah selama lima bulan ke depan.

Penguatan produksi dan pengelolaan gabah/beras, jagung, serta kedelai, telah dilaksanakan melalui upaya percepatan pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) BULOG untuk infrastruktur pascapanen. Infrastruktur pascapanen

terus dibangun menggunakan anggaran PMN BULOG tahun 2016 dengan total sebesar Rp2,0 triliun. Hingga akhir 2021, nilai proyek infrastruktur pascapanen yang telah dilakukan lelang sebesar Rp1,37 triliun atau 69% dari total keseluruhan dana PMN TA 2016. Rencana pembangunan infrastruktur pascapanen tersebut meliputi *Modern Rice Milling* (MRMP) sebanyak 13 unit, *Rice To Rice* (RTR) sebanyak 7 unit, *Corn Drying Center* (CDC) sebanyak 6 unit, Gudang Kedelai sebanyak 2 Unit, Gudang Komoditas Pangan (GKP) sebanyak 20 Unit, dan Gudang Modern & DC sebanyak 4 Unit



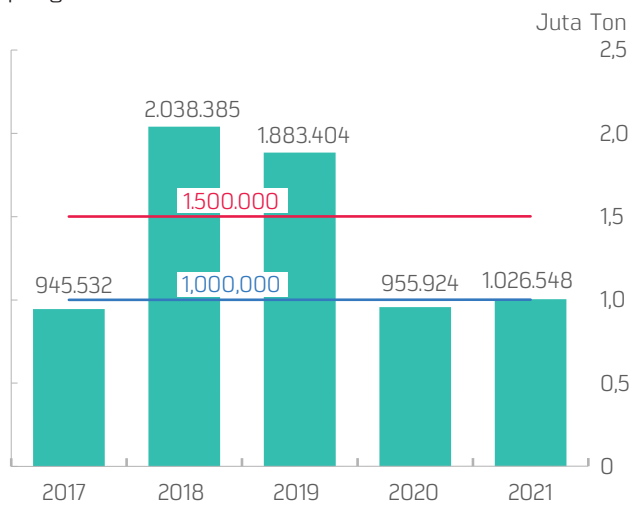
Sumber: BULOG

Grafik 2.14. Realisasi PMN BULOG



Gambar 2.1. Gudang Komoditas Pangan dan Gudang Modern

Pemerintah berkomitmen menjamin ketersediaan stok dan penyaluran beras demi menjaga ekspektasi masyarakat atas kecukupan pasokan dan menjaga stabilisasi harga beras. Perum BULOG berupaya menjaga ketersediaan CBP di level 1-1,5 juta ton serta melakukan penyaluran KPSH secara berkala. Pada 2019, level CBP terjaga pada kisaran 1-1,5 juta ton, namun pada 2020 berada sedikit di bawah target yaitu sebesar 955,924 ton. Hal ini disebabkan oleh tingginya penyaluran beras BULOG pada 2020, baik untuk KPSH sebesar 1.026.662 ton dan Bantuan Sosial Beras (BSB) Pemerintah sebesar 450.000 ton saat pandemi Covid-19. Pada 2021, CBP mencapai 1 juta ton didukung tingginya pengadaan beras oleh Perum BULOG.



Sumber: Perum BULOG, diolah

Grafik 2.15. Stok Beras BULOG

Upaya menjaga ketersediaan pasokan juga didukung upaya penguatan kelembagaan atau kapasitas pembiayaan petani, antara lain melalui penyesuaian ketentuan dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi KUR pertanian tahun 2019 mencapai Rp31,8 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1.307.792 petani, kemudian pada tahun 2020 meningkat mencapai Rp55,9 triliun (melebihi target Rp50 triliun di 2020). Pada tahun 2021, realisasi KUR pertanian mencapai Rp85,6 triliun. Pada 2020, Kementan telah memfasilitasi penyaluran KUR untuk pembelian alsintan pada daerah sentra yang sudah menerapkan mekanisasi. Selain itu, untuk mengakselerasi penyaluran KUR sektor pertanian, Kementan telah menerbitkan Permentan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pelaksanaan KUR Sektor Pertanian³, dimana salah satu ketentuannya memperbolehkan petani mendapatkan pembiayaan Sistem Resi Gudang (SRG) dengan menggunakan pinjaman KUR.

3 Permentan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pelaksanaan KUR Sektor Pertanian merupakan turunan dari Permenko Nomor 15 Tahun 2020 dan Permenko Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Berbagai program kerja lainnya juga telah dilaksanakan untuk mendorong penguatan kelembagaan petani. Salah satu program kerja tersebut yakni optimalisasi pemanfaatan SRG untuk meningkatkan nilai pembiayaan jaminan resi gudang dan penggunaan SRG untuk beras maupun komoditas lainnya. Pada 2021, nilai pembiayaan SRG telah mencapai Rp314,34 miliar, meningkat dari Rp56,6 miliar pada 2019 dan Rp93,6 miliar pada 2020. Selain itu, implementasi Kartu Tani diperluas baik di wilayah Jawa dan luar Jawa yang meningkat menjadi 6,2 juta pada 2020 dari sebelumnya 5,7 juta pada 2019. Transisi kelembagaan petani dan *contract farming* juga terus didorong sehingga meningkatkan jumlah kelembagaan ekonomi petani dan akses pembiayaan perbankan melalui kerja sama antara gabungan kelompok petani (gapoktan) dengan industri pengolahan. Pada 2020, telah terbentuk sebanyak 50 korporasi petani dan pada 2021 ditargetkan sebanyak 100 korporasi petani.

Di sisi lain, terdapat program kerja yang pelaksanaannya belum sesuai dengan target awal yang ditetapkan, khususnya karena kendala anggaran dan lapangan. Beberapa program kerja tersebut yaitu (i) upaya penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) non beras⁴; dan (ii) pengelolaan impor tepat jumlah dan tepat waktu. Upaya penguatan CPP masih terbatas pada komoditas jagung dimana BULOG telah menyusun kajian awal untuk menghitung jumlah CPP. Namun demikian, upaya tersebut masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut untuk penghitungan jumlah CPP yang dibutuhkan dan masih menghadapi kendala anggaran dan lapangan, antara lain pantauan satelit yang tidak dapat membedakan antara komoditas jagung dan padi. Sementara itu, BULOG telah mengoptimalkan dana Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) komoditas jagung pada 2021. BULOG melakukan penyerapan jagung dari petani sebanyak 30.000 ton pada harga yang dinilai menguntungkan petani sebesar Rp5.800-Rp6.200/kg, kemudian disalurkan kepada peternak sasaran sehingga peternak mendapatkan bahan baku dengan harga terjangkau sebesar Rp4.500/kg.

Terkait impor, pelaksanaan realisasi impor yang tepat jumlah dan tepat waktu masih terkendala. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keterlambatan importasi bawang putih, bawang bombay, dan gula pada awal triwulan I 2020 sehingga menyebabkan kenaikan inflasi komoditas tersebut. Namun pada 2021, inflasi sejumlah komoditas impor tersebut terpantau stabil didukung kebijakan *sunset clause* khususnya untuk impor bawang putih.

4 jagung, kedelai, gula, dan daging sapi

2.2.3. Kelancaran Distribusi (K3)

Dalam rangka memastikan kelancaran distribusi bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemerintah berupaya mendorong **Kerjasama Antar Daerah (KAD)** dan **meningkatkan infrastruktur perdagangan**. Upaya mendorong KAD telah dilakukan melalui pengembangan model bisnis KAD dan implementasi *pilot project* di daerah. Per 2021, terdapat 93 KAD yang terpantau berjalan dan melakukan transaksi, yaitu 21 KAD untuk komoditas hortikultura, 37 KAD untuk komoditas tanaman pangan, 15 KAD untuk komoditas peternakan/perikanan, dan 20 KAD untuk aneka komoditas pangan. Salah satu model bisnis KAD yang berjalan dengan baik adalah model bisnis BUMD Pangan oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan beberapa daerah sentra pangan.

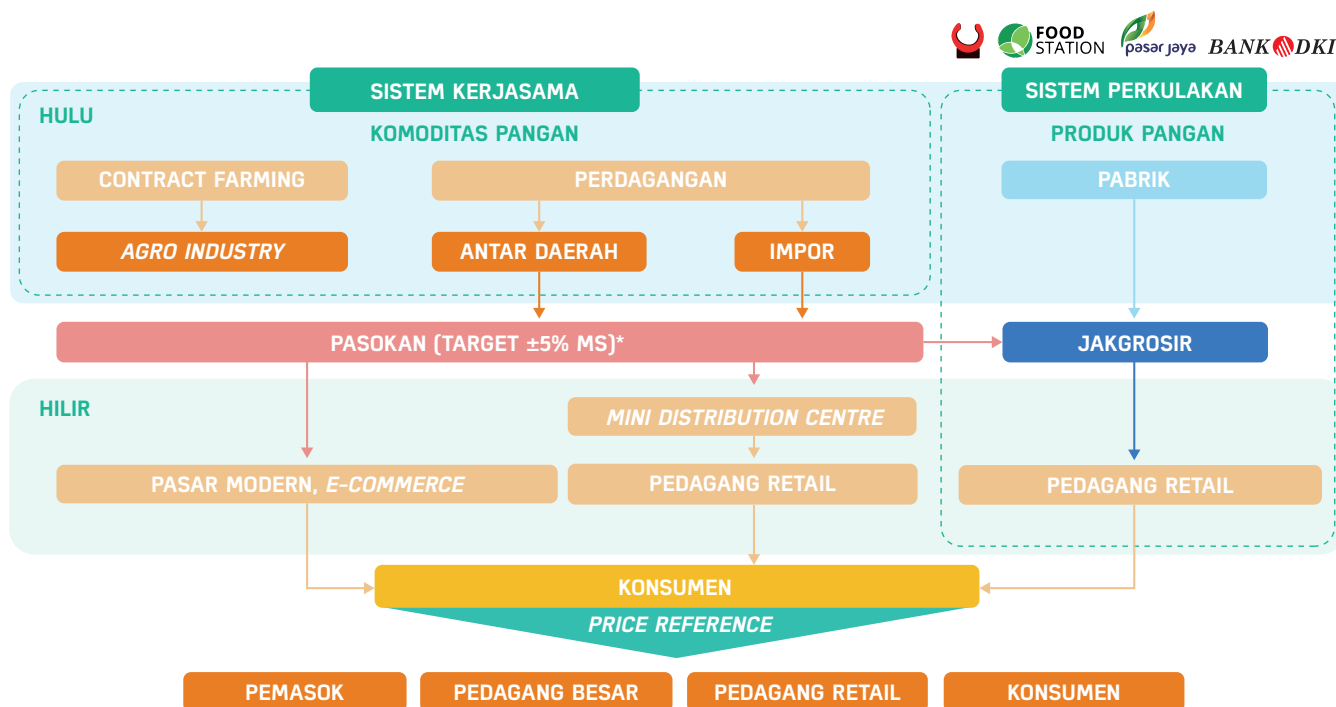
Di sisi lain, upaya pembangunan **Pasar Induk Beras (PIB)** menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Pembangunan PIB oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Perum BULOG di Pare-Pare telah berhasil direalisasikan. Namun demikian, pengelolaannya masih belum optimal akibat kendala operasional, khususnya beberapa aspek di tataran perencanaan dan implementasi. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi dan kajian lebih lanjut terkait kondisi PIB Pare-Pare tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat kembali rencana pembangunan PIB di berbagai wilayah lain di Indonesia.

2.2.4. Komunikasi Efektif (K4)

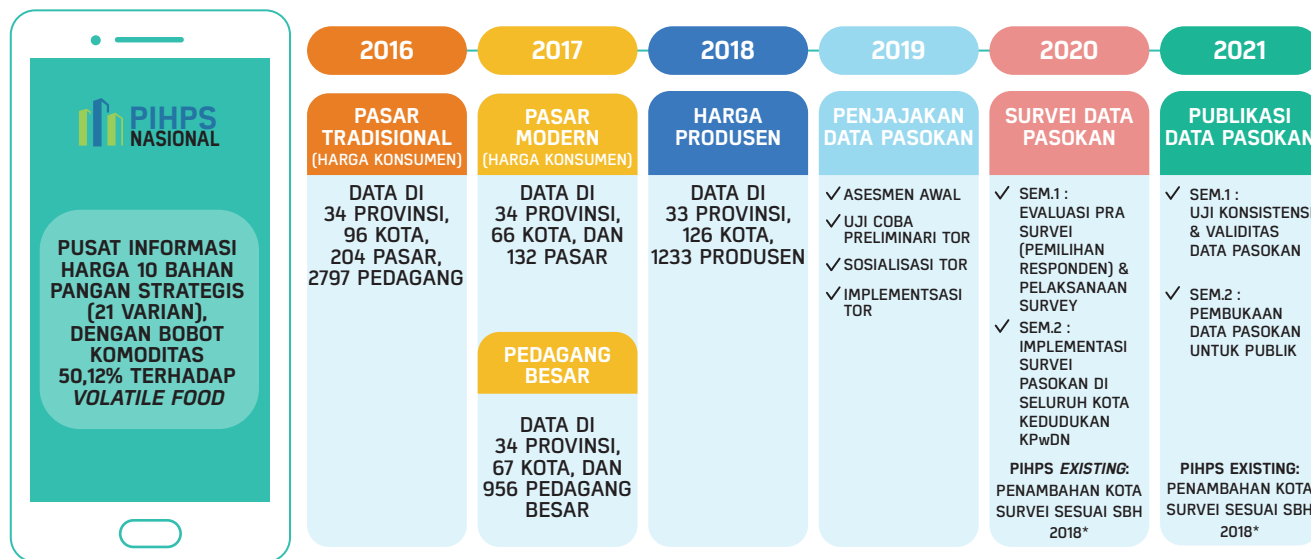
Komunikasi yang efektif dalam pengendalian inflasi terus diperkuat dengan didukung upaya perbaikan kualitas data, antara lain melalui penyusunan kebijakan satu peta lahan pertanian. Program kerja tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 sebagai solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan. Namun demikian, penyusunan kebijakan satu peta lahan pertanian untuk saat ini baru tersedia untuk padi dan belum diperluas pada komoditas pangan lainnya.

Perluasan satu peta lahan pertanian untuk komoditas lainnya semula direncanakan pada lahan jagung. Namun demikian, pelaksanaannya mengalami beberapa kendala antara lain kesulitan Kerangka Sampel Area (KSA) dalam membedakan lahan jagung dengan komoditas lainnya, terdapat lahan jagung yang terletak di lahan bukan resmi perladangan sehingga tidak dapat terjangkau oleh KSA, serta adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19.

Perbaikan kualitas data oleh Bank Indonesia dilakukan antara lain melalui penguatan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang terintegrasi dan peningkatan korelasi antara data harga PIHPS dengan BPS. Penguatan data PIHPS yang terintegrasi telah dilakukan pada harga level konsumen di pasar tradisional hingga pasar modern, dan harga level pedagang besar hingga level

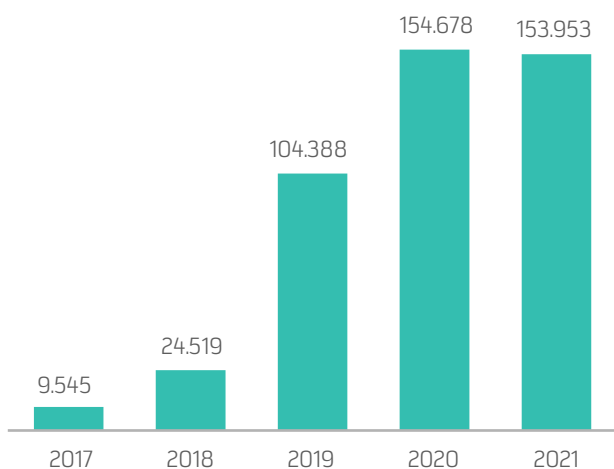


Gambar 2.2. Model Bisnis KAD DKI Jakarta



Gambar 2.3. Timeline Pengembangan PIHPS

produsen. Pada 2021, dilakukan penambahan cakupan kota dalam data harga PIHPS agar sejalan dengan data Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 BPS, serta persiapan publikasi data pasokan. Sementara itu, upaya peningkatan korelasi antara data harga PIHPS dengan BPS telah berjalan dengan cukup baik sehingga mampu dijadikan sebagai salah satu referensi indikator inflasi komoditas pangan strategis.



Grafik 2.16. Pengguna Data PIHPS

Penguatan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara pusat dan daerah terus dilakukan, antara lain melalui upaya pembinaan TPID. Program kerja ini merupakan upaya bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia untuk mendorong kehandalan TPID dalam pencapaian target inflasi daerah. Pada 2019 (evaluasi kinerja TPID tahun 2018),

tingkat kehandalan TPID telah meningkat dan berada di atas target median 40. Namun demikian, capaian tersebut sedikit menurun pada tahun 2020 dan 2021 (evaluasi kinerja TPID tahun 2019-2020) terutama akibat menurunnya tingkat kehandalan TPID non IHK.

2.3. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Gap analysis dan identifikasi *lessons learned* dari program kerja pengendalian inflasi 2019-2021 dalam kerangka 4K dilakukan untuk memastikan keberlangsungan program kerja yang dinilai strategis dan memiliki capaian yang baik, sekaligus untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi dalam upaya optimalisasi program kerja pengendalian inflasi ke depan.

2.3.1. Keterjangkauan Harga (K1)

Keberhasilan dari upaya menjaga keterjangkauan harga dapat dilihat dari capaian inflasi yang rendah dan stabil khususnya untuk komoditas pangan strategis⁵. Selain itu, upaya menjaga keterjangkauan harga dapat dilihat dari terjaganya volatilitas nilai tukar guna menjaga stabilitas harga barang-barang yang berasal dari impor, serta permintaan yang dikelola dengan baik sebagaimana tercermin dari *output gap* yang menyempit.

5 Beras, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan gula pasir.

Secara umum, *gap analysis* menunjukkan bahwa inflasi dan volatilitas komoditas pangan strategis selama 2019-2021 telah mengalami penurunan. Penurunan inflasi terutama terjadi pada komoditas beras, aneka bawang, daging ayam, daging sapi, telur ayam, dan gula pasir. Namun demikian, inflasi tahunan minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit masih meningkat. Apabila dilihat berdasarkan volatilitasnya, hanya komoditas daging ayam dan minyak goreng yang mengalami peningkatan volatilitas. Tingginya inflasi dan volatilitas minyak goreng didorong oleh kenaikan harga CPO global. Sementara itu, tingginya inflasi aneka cabai disebabkan oleh pola siklikal musim tanam dan panen, sulitnya penyimpanan seiring dengan karakternya yang bersifat *perishable*, serta tingginya permintaan masyarakat pada cabai segar. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih struktural untuk menurunkan volatilitas harga komoditas yang bersifat *perishable* tersebut.

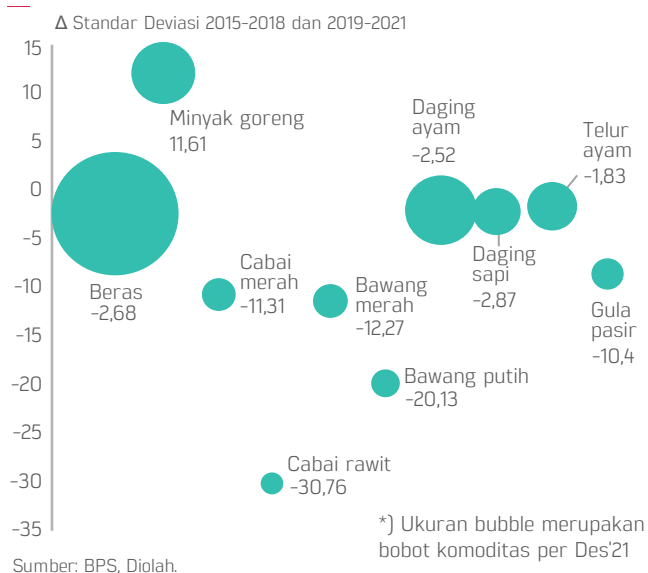
Selain itu, *gap analysis* juga menunjukkan bahwa *negative output gap* semakin melebar akibat adanya pandemi, sehingga Pemerintah juga dihadapkan pada tantangan untuk lebih memperkuat upaya pemulihan ekonomi dan meningkatkan PDB. Upaya ini penting guna memperkuat pencapaian keterjangkauan harga.

Lessons learned kebijakan stabilisasi harga pangan menunjukkan pentingnya memastikan keberlanjutan program kerja tersebut untuk menjaga stabilitas harga. Evaluasi tahun 2021 menunjukkan harga beberapa komoditas pangan masih berada di atas HET, seperti daging sapi, bawang merah, dan minyak goreng. Penyaluran melalui KPSH beras perlu terus dilakukan dan ditingkatkan efektifitasnya untuk mendukung stabilisasi harga beras.



Sumber: BPS, Diolah.

Grafik 2.17. Inflasi Tahunan 10 Komoditas Pangan Utama



Grafik 2.18. Selisih Standar Deviasi dan Bobot Komoditas Pangan

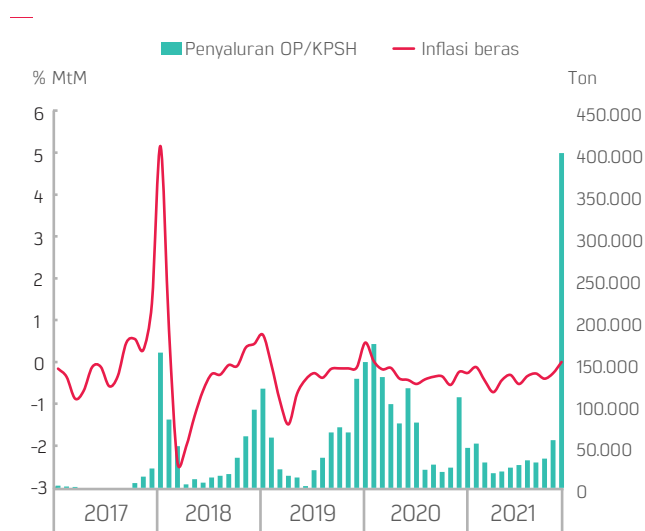
Upaya menjaga kestabilan harga menghadapi tantangan dari ketidakpastian dan tekanan eksternal. Volatilitas nilai tukar dan kenaikan harga komoditas global turut berkontribusi pada inflasi domestik, baik inflasi inti, *volatile food*, maupun *administered prices*. Di sisi lain, selisih harga jual energi dengan harga keekonomiannya cukup lebar seiring minimnya upaya penyesuaian harga energi oleh Pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi harga perlu diperkuat dan volatilitas nilai tukar perlu terus dijaga untuk mengurangi dampak eksternal terhadap inflasi domestik. Selain itu, akselerasi pemulihan ekonomi pascapandemi dan dampak tunda pembiayaan ekonomi terhadap inflasi juga perlu diwaspadai, meski Pemerintah juga dihadapkan pada tekanan untuk mendorong pemulihan ekonomi lebih lanjut. Oleh karena itu, upaya menjaga keseimbangan internal perekonomian melalui penerapan bauran kebijakan termasuk *exit policy* menjadi sangat penting untuk dilakukan.

2.3.2. Ketersediaan Pasokan (K2)

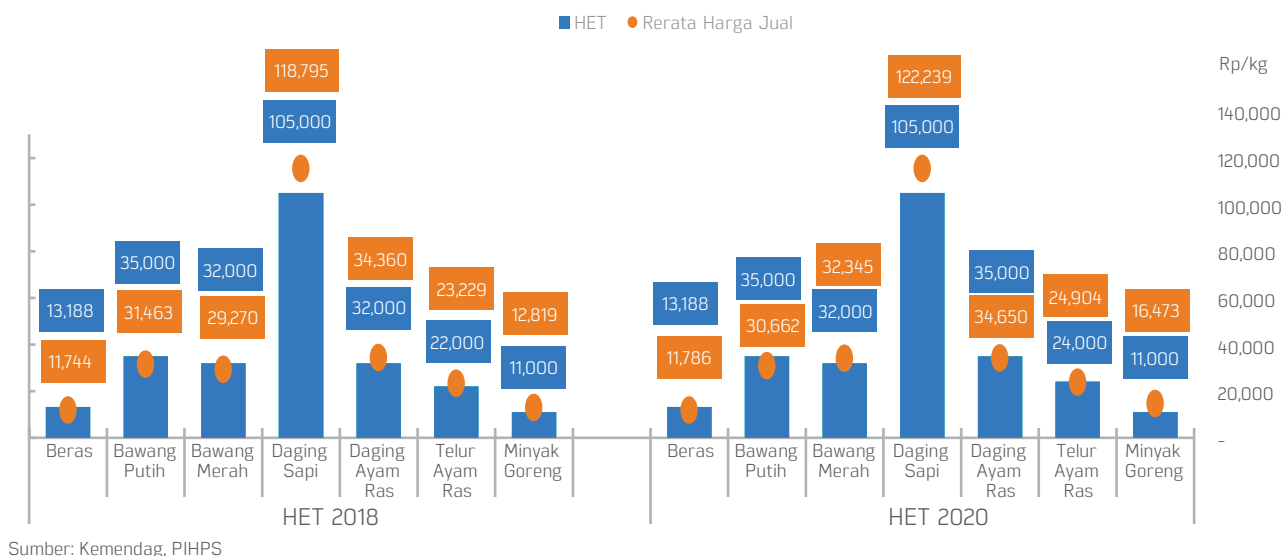
Upaya menjaga ketersediaan pasokan dapat dilihat antara lain dari indikator angka rendemen beras⁶, dan level CBP yang terjaga pada level 1-1,5 juta ton. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat rendemen beras mencapai 64,02% pada tahun 2018 lebih tinggi dari target sebesar 63%. Selain itu, stok CBP di BULOG per 2021 juga berada dalam kisaran 1 juta ton, sehingga mendukung kestabilan inflasi beras pada 2021.

Upaya menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis, seperti aneka cabai, masih dihadapkan pada

6 Rendemen beras adalah persentase dari berat beras yang dihasilkan dari penggilingan gabah atau padi yang digiling.



Grafik 2.20. Perkembangan Penyaluran KPSH



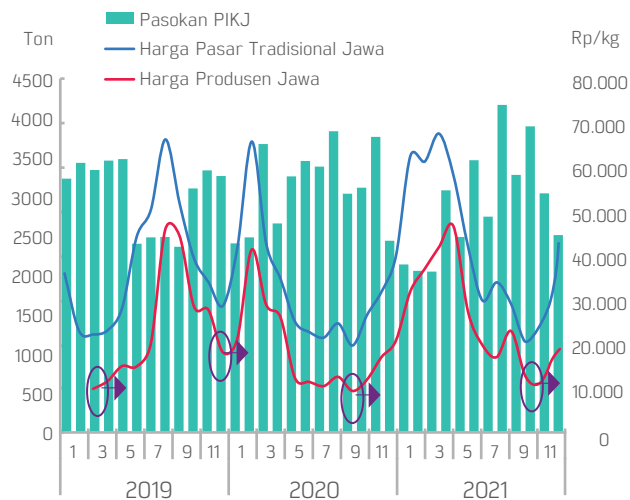
Grafik 2.19. HET dan Harga Jual

tantangan perbaikan sistem budidaya. Inflasi komoditas cabai merah masih memiliki volatilitas yang tinggi antarwaktu seiring dengan perilaku tanam petani yang masih sangat bergantung pada dinamika harga di pasar. Di sisi lain, sentra pangan sebagian besar masih terpusat di Jawa sehingga mendorong disparitas harga yang cukup tinggi antarwilayah..

Lessons learned dari upaya menjaga ketersediaan pasokan menunjukkan bahwa pemenuhan pasokan dari dalam dan luar negeri perlu terus dikawal. Selain ketersediaan CBP dalam rentang target, pola pengelolaan penyaluran juga perlu diperhatikan dan dilakukan secara berkala. Upaya untuk meningkatkan produktivitas dan mengatasi tantangan fluktuasi pasokan antarwaktu dapat dilakukan melalui penguatan adopsi teknologi. Sementara itu, pelaksanaan impor memerlukan *timing* dan besaran yang terukur, serta proses yang lebih efisien.

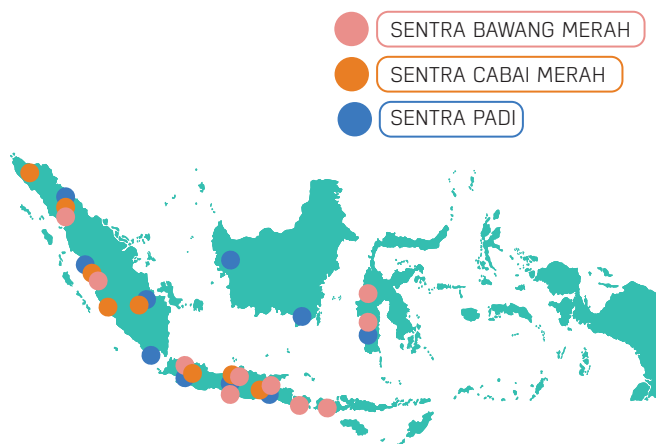
Penguatan kelembagaan dan kapasitas pembiayaan petani melalui program kerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah berjalan dengan baik, sehingga perlu terus dioptimalkan dengan mempercepat dan mempermudah penyalurannya.

Selain penggunaan benih varietas unggul, pupuk organik, dan pengetahuan budidaya yang baik, juga diperlukan pemanfaatan teknologi untuk lebih meningkatkan produksi pangan. Namun demikian, khusus adopsi informasi dan teknologi oleh petani juga masih relatif rendah, dimana pada 2020, hanya sekitar 13% petani Indonesia yang menggunakan internet sebagai sumber informasi pertanian. Selain itu, *gap analysis* terkait impor tepat waktu dan tepat jumlah juga menunjukkan mekanisme perizinan importasi yang masih perlu ditingkatkan, tercermin dari capaian inflasi bawang putih dan daging sapi, terutama akibat belum optimalnya pasokan impor pangan.



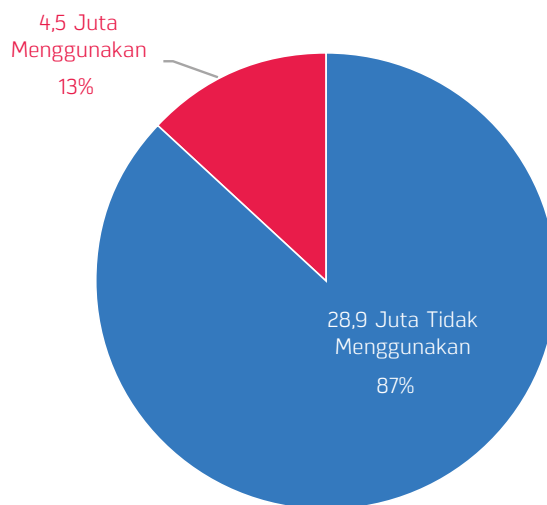
Sumber: PIHPS dan PIKJ

Grafik 2.21. Pasokan dan Harga Aneka Cabai



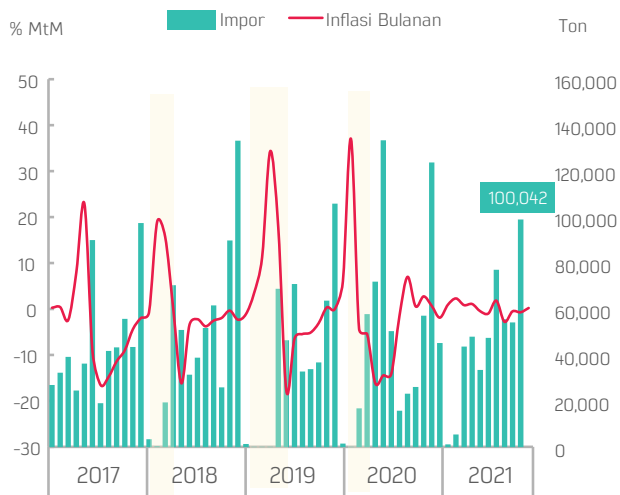
Sumber: Kementan

Gambar 2.4. Sentra Produksi Pangan



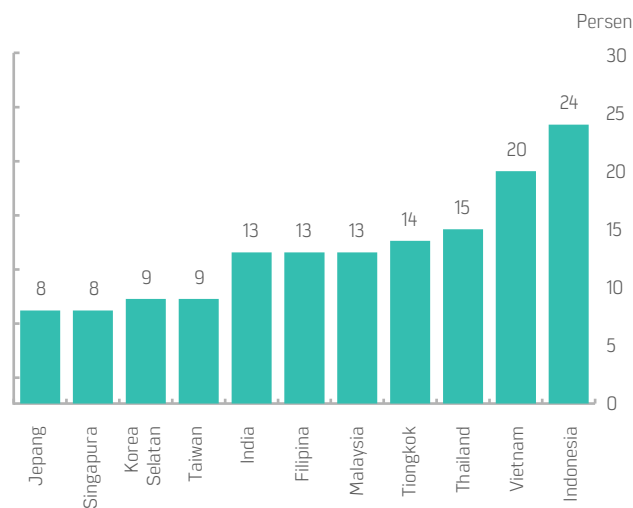
Sumber: Kompas (2020)

Grafik 2.22. Jumlah Petani Pengguna Internet



Sumber: BI dan BPS, diolah

Grafik 2.23. Perkembangan Impor Bawang Putih



Sumber: Frost and Sullivan (2019)

Grafik 2.24. Biaya Logistik per PDB

2.3.3. Kelancaran Distribusi (K3)

Upaya mendorong KAD dan meningkatkan infrastruktur perdagangan tidak hanya dapat mendukung kelancaran distribusi dan memenuhi kebutuhan pangan masing-masing daerah, namun juga diharapkan dapat menurunkan disparitas harga antarprovinsi dengan rata-rata nasional.

Disparitas inflasi spasial terpantau masih tinggi, meski cenderung menyempit sejak 2019. Pada 2021, disparitas inflasi VF sedikit meningkat seiring dengan tingginya inflasi VF di Sulawesi Barat, yaitu sebesar 9,97% (yoy) dan deflasi terdalam di Sumatera Barat sebesar -0,38% (yoy)

Disparitas inflasi spasial tersebut juga disebabkan oleh tingginya biaya logistik yang mencapai 24% dari PDB. Biaya tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan negara kawasan yakni Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Oleh karena itu, untuk memperlancar distribusi, diperlukan penguatan sistem logistik nasional, salah satunya melalui tol laut. Tol laut yang terintegrasi dan efisien diharapkan mampu menekan biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah.

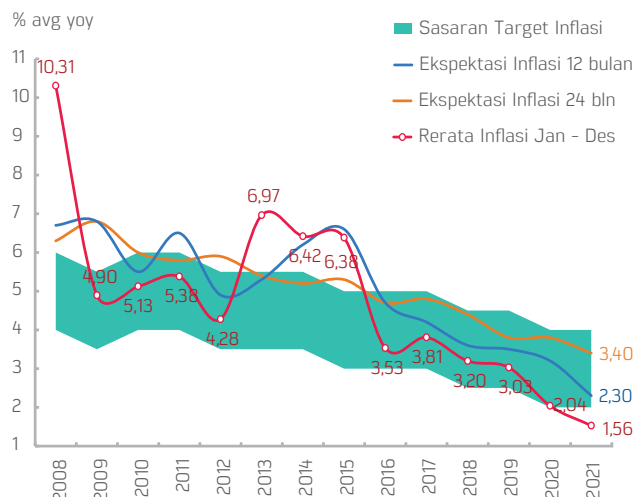
Lessons learned dari upaya menjaga kelancaran distribusi menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan pemanfaatan **e-commerce** sebagai upaya untuk memotong rantai pasok barang, terutama bahan pangan. Langkah ini juga memanfaatkan momentum pergeseran pola konsumsi masyarakat yang lebih memilih *grocery delivery* dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi Covid-19. Terkait KAD, masih diperlukan penguatan melalui perluasan wilayah dan realisasi kerjasamanya, yang juga memerlukan dukungan Pemda, swasta (pelaku usaha), serta optimalisasi pemanfaatan teknologi.

2.3.4. Komunikasi Efektif (K4)

Program kerja pada aspek komunikasi yang efektif ditujukan untuk (i) mampu mengendalikan ekspektasi inflasi sehingga terjangkau dalam sasaran; (ii) menjaga korelasi antara data PIHPS dan inflasi BPS minimal 0,8 sebagai indikator dini pergerakan harga dan pasokan; serta (ii) mampu meningkatkan kehandalan TPID dalam menjaga stabilitas inflasi daerah.

Berbagai program kerja K4 terkait ekspektasi inflasi, peningkatan akurasi PIHPS, dan penguatan kehandalan TPID telah berjalan dengan cukup baik. Ekspektasi inflasi secara umum terjangkau dalam kisaran sasaran, meskipun pada 2021 berada di bawah kisaran sasaran seiring terjadinya pandemi. Di sisi lain, keakuratan data PIHPS pada tiga tahun terakhir cukup baik karena sebagian besar memiliki angka korelasi dengan data BPS di atas 0,8, kecuali pada tahun 2021 untuk komoditas daging sapi sehingga masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, tingkat kehandalan TPID dalam menjaga stabilitas inflasi daerah secara umum telah berada di atas median, kecuali pada 2020 dipengaruhi menurunnya kehandalan TPID non IHK. Guna meningkatkan efektifitas komunikasi dan mendukung perumusan kebijakan yang optimal, perlu terus dilakukan penguatan data berbasis teknologi informasi, serta peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Upaya menjaga komunikasi yang efektif perlu didukung juga oleh ketersediaan data yang berkualitas. Untuk itu, pengembangan data pertanian yang mencakup data pasokan dan produksi yang terintegrasi perlu terus dilanjutkan, sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan kebijakan, termasuk meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah. Selain itu, harmonisasi program kerja dalam implementasi peta jalan TPIP-TPID perlu diperkuat untuk mendukung stabilitas harga dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional.



Sumber: BPS, diolah

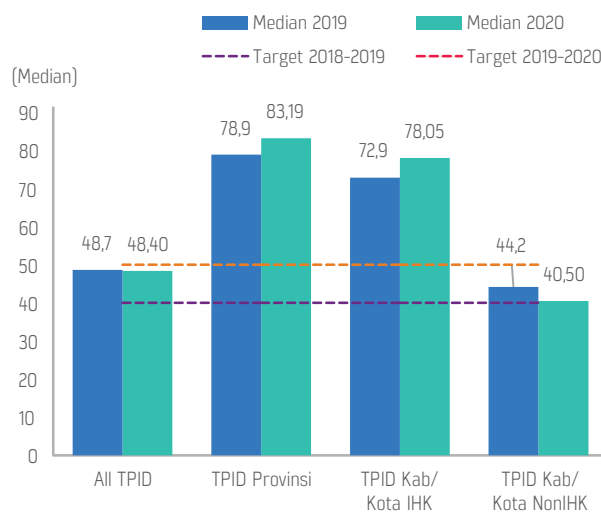
Grafik 2.25. Ekspektasi Inflasi

KOMODITAS	2019	2020	2021
BERAS	0,98	0,86	0,86
DAGING AYAM	0,73	0,87	0,85
DAGING SAPI	0,40	0,80	0,77
TELUR AYAM	0,88	0,94	0,96
BAWANG MERAH	0,85	0,95	0,95
BAWANG PUTIH	0,93	0,98	0,98
CABAI MERAH	0,95	0,95	0,95
CABAI RAWIT	0,89	0,96	0,98
MINYAK GORENG	0,84	0,93	0,95
GULA PASIR	0,88	0,98	0,98

Korelasi antara PIHPS dan SBH mtrn
0,40-0,80 | 0,80-0,90 | >0,90

Sumber: BI dan BPS, Diolah.

Tabel 2.1. Korelasi Data PIHPS dan BPS



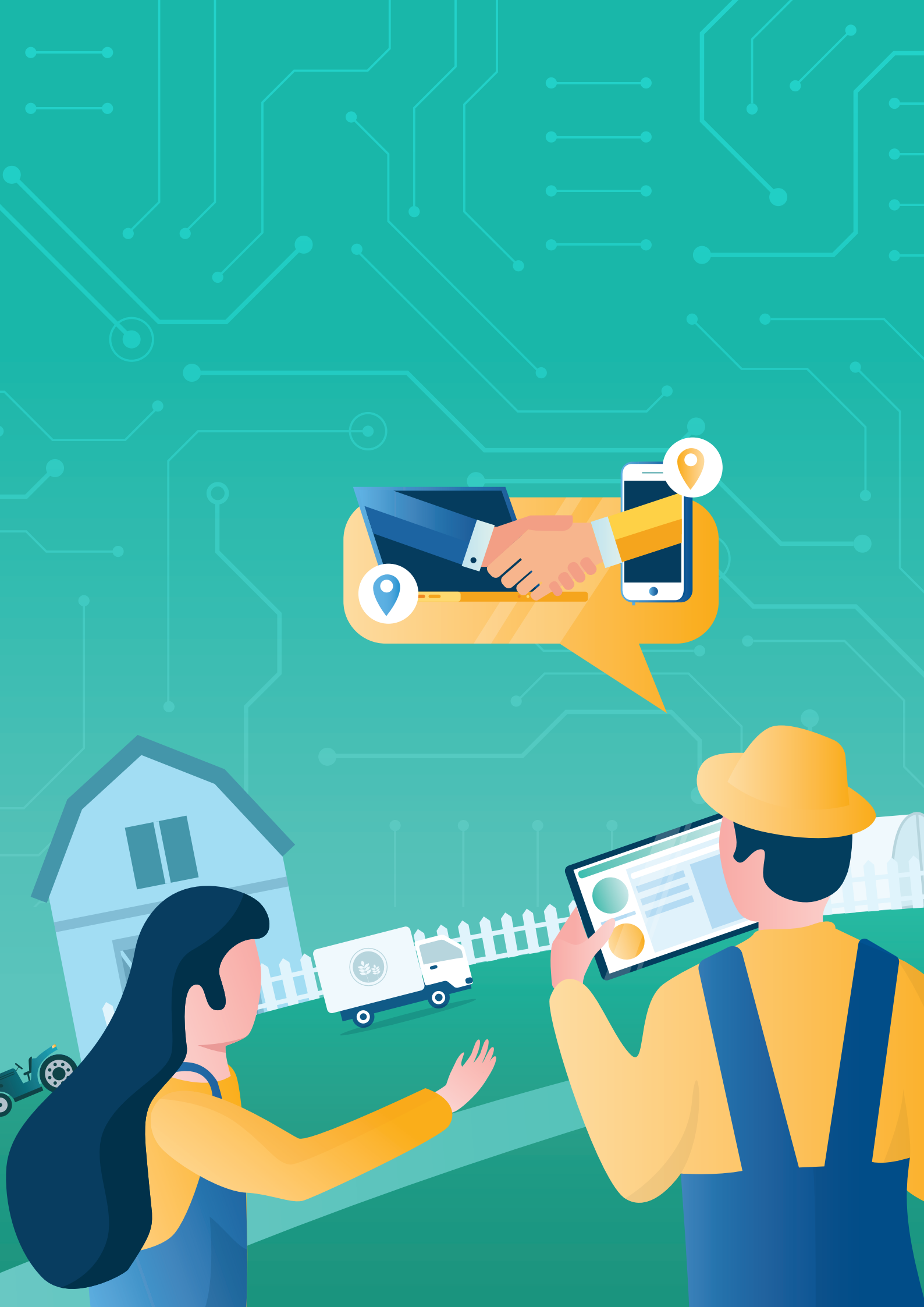
Sumber: TPIP

Grafik 2.26. Kinerja TPID 2019-2020

BAB 3

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2022-2024





Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024

TEKANAN INFLASI IHK MENINGKAT

INFLASI INTI



- Volatilitas harga komoditas global dan nilai tukar yang disebabkan perbedaan kecepatan pemulihan ekonomi antara negara maju dan berkembang.
- Peningkatan harga komoditas global berpotensi mendorong inflasi dari bahan baku produksi (*cost-push inflation*)
- Perbaikan permintaan dan mobilitas domestik berpotensi meningkatkan konsumsi domestik (*demand pull inflation*)
- Potensi tekanan inflasi akibat dampak tunda dari tambahan likuiditas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

INFLASI VOLATILE FOOD



- Belum teratasinya dengan baik permasalahan struktural inflasi VF (disparitas harga antarwaktu dan antarwilayah)
- Peningkatan permintaan sektor horeca paska pandemi Covid-19
- Kenaikan harga pangan global ditransmisikan ke harga domestik
- Tantangan permasalahan logistik nasional, terutama ke wilayah 3T
- Dampak *global warming* dapat mengganggu aktivitas produksi dan distribusi bahan pangan

INFLASI ADMINISTERED PRICES



- Kenaikan harga komoditas global, terutama energi
- Keberlanjutan program reformasi energi dengan penajaman target penerima subsidi dan perubahan skema penyaluran subsidi
- Kenaikan tarif aneka angkutan untuk mengompensasi penurunan margin selama pandemi
- Peningkatan transmisi kenaikan cukai tembakau ke harga jual konsumen sejalan dengan perbaikan permintaan
- Penyesuaian tarif administrasi lainnya yang diatur Pemerintah, termasuk perpajakan

SASARAN INFLASI



2022

3,0%±1%

2023

3,0%±1%

2024

2,5%±1%

KONDISI YANG DIHARAPKAN

INTI

- Ekspektasi inflasi tetap terjaga di tengah potensi kenaikan inflasi dari sisi penawaran dan permintaan
- Tambahan likuiditas untuk mendukung PEN dan *exit strategy* tidak meningkatkan fluktuasi inflasi

VF

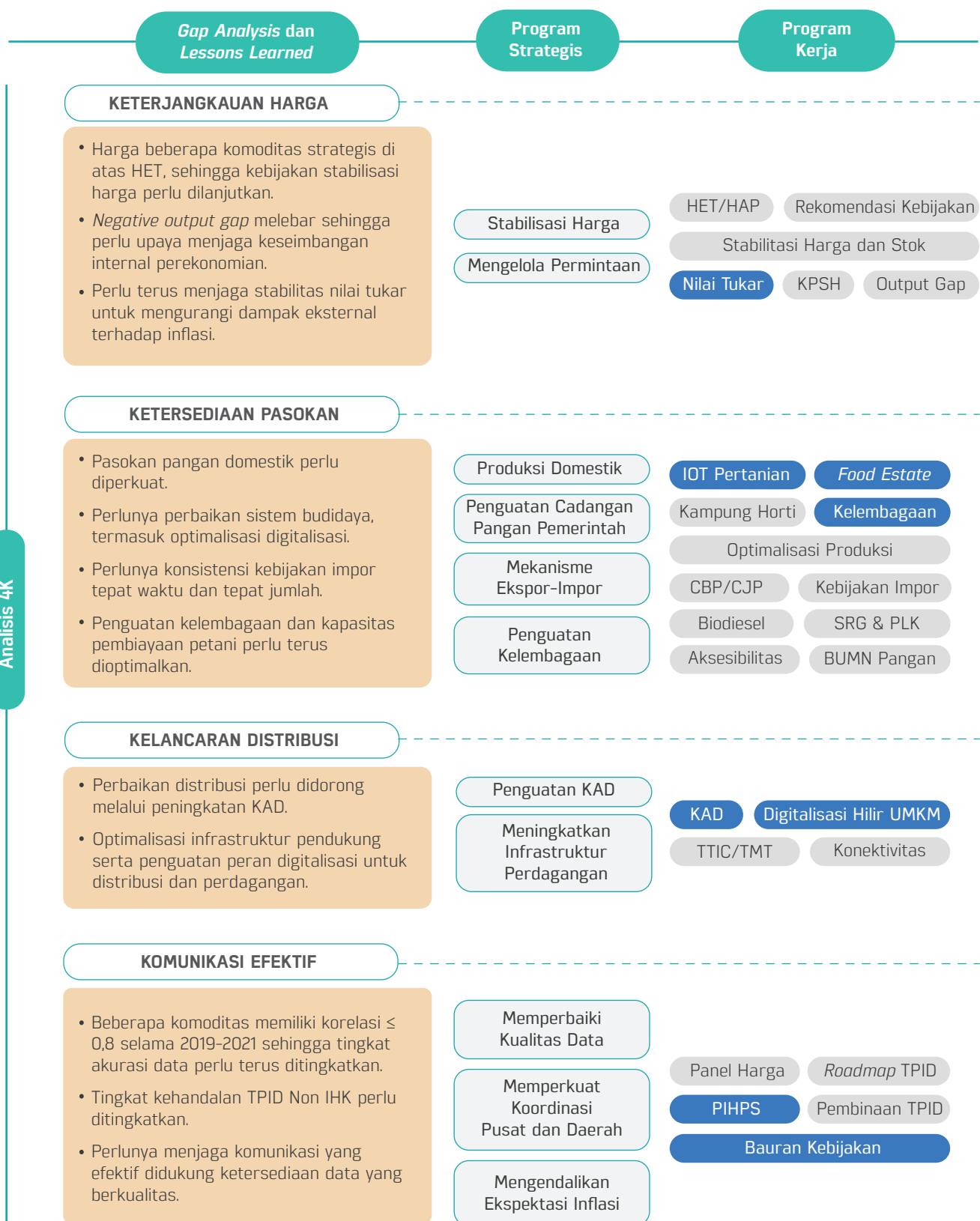
- Perbaikan permasalahan struktural VF melalui strategi 4K
- Penurunan tren dan volatilitas inflasi untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi

AP

- Penerapan reformasi energi dengan mempertimbangkan *magnitude*, *timing*, dan *sequencing* pada inflasi
- Penyesuaian kebijakan pemerintah lainnya yang tetap mengutamakan pencapaian target sasaran inflasi

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024

Analisis 4K



Keterangan:
 Program *Flagship*

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2022-2024

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 disusun sebagai panduan dan rekomendasi pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka pencapaian sasaran inflasi tahun 2022-2024.

Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati sasaran inflasi tahun 2022, 2023, dan 2024 masing-masing sebesar 3,0%, 3,0%, dan 2,5% dengan deviasi $\pm 1\%$, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021. Sasaran inflasi dimaksud ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu (i) tingkat inflasi yang optimal untuk mendukung lintasan pertumbuhan ekonomi menuju negara berpenghasilan tinggi; (ii) dinamika risiko yang masih tinggi pascapandemi, termasuk dampak tunda likuiditas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); (iii) ruang kebijakan moneter untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional; dan (iv) lintasan disinflasi yang mengarah pada level inflasi yang optimal dan kompetitif dengan negara mitra dagang.

3.1. Arah Kebijakan

Tekanan inflasi berpotensi meningkat pada jangka menengah sejalan dengan akselerasi pemulihan ekonomi domestik, peningkatan mobilitas masyarakat, tekanan harga komoditas global dan reformasi kebijakan fiskal, di

tengah stabilitas nilai tukar yang terjaga dan ekspektasi inflasi yang tetap terjangkau dalam kisaran sasaran.

Dari sisi global, terdapat divergensi pemulihan ekonomi antara negara *Emerging Markets* (EM) dengan *Advanced Economies* (AE) sehingga menyebabkan normalisasi kebijakan moneter global. Selain itu, terjadi peningkatan inflasi global sebagai dampak dari (i) kenaikan harga komoditas global pascastimulus fiskal saat pandemi Covid-19; (ii) adanya gangguan *supply chain* pascarestriksi mobilitas untuk mengendalikan penyebaran Covid-19; serta (iii) perubahan iklim global.

Transmisi dari sisi eksternal diperkirakan menambah tekanan di sisi domestik.

Kenaikan harga komoditas global yang meningkatkan biaya bahan baku, berpotensi mendorong pelaku usaha di dalam negeri mentransmisikan kenaikan harganya kepada konsumen. Dari sisi domestik, potensi inflasi berasal dari kenaikan permintaan seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi dan dampak kebijakan moneter akomodatif termasuk pembiayaan pemerintah untuk program PEN. Selain itu, Pemerintah dihadapkan pada *gap* antara harga jual dan harga keekonomian komoditas energi yang semakin lebar, di tengah upaya konsolidasi fiskal dan transformasi subsidi. Lebih lanjut, perubahan iklim dan permasalahan struktural pangan domestik diperkirakan dapat menekan produktivitas pangan, namun terdapat peluang dari adanya teknologi dan tren digitalisasi yang semakin berkembang terutama di era pandemi.



Gambar 3.1. Framework Peta Jalan 2022-2024

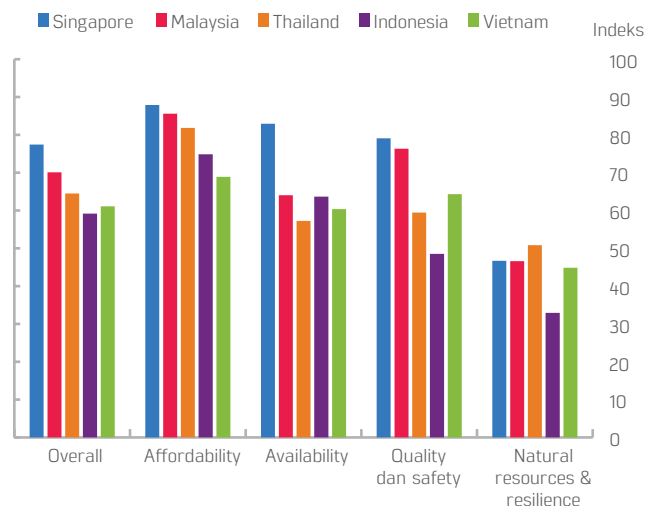
Kebijakan pengendalian inflasi ke depan melalui penyusunan Peta Jalan Inflasi 2022-2024 menjadi semakin penting. Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 mengambil tema “Akselerasi Perbaikan Struktural dengan Mendorong Adopsi Digital untuk Stabilitas Inflasi dan Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia Maju”. Struktur Peta Jalan tersebut tetap mengacu pada aspek 4K, yaitu (i) Kestabilan Harga yang berfokus pada stabilisasi harga dan pengelolaan permintaan; (ii) Ketersediaan Pasokan yang berfokus pada produksi dalam negeri, impor, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan penguatan kelembagaan; (iii) Kelancaran Distribusi yang berfokus pada penguatan KAD dan infrastruktur perdagangan; serta (iv) Komunikasi Efektif yang berfokus pada perbaikan kualitas data, koordinasi pusat-daerah, dan pengelolaan ekspektasi.

Akselerasi digital menjadi salah satu fokus utama Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024, sejalan dengan arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021 untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks ketahanan pangan Indonesia relatif rendah dibandingkan beberapa negara kawasan, sejalan dengan rendahnya produktivitas dan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Namun demikian, kebutuhan pangan semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan adanya risiko perubahan iklim yang berpotensi mengganggu produksi pangan. Di sisi lain, perkembangan teknologi, penggunaan internet, *e-commerce*, dan *platform digital* meningkat signifikan selama pandemi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai upaya mengintegrasikan pengembangan ekosistem sektor pertanian dari sisi hulu hingga hilir melalui adopsi teknologi secara *end-to-end*.

Strategi adopsi teknologi digital secara *end-to-end* ditempuh melalui beberapa program kerja, antara lain penguatan kelembagaan melalui korporatisasi petani dan akses pembiayaan, peningkatan dan perluasan adopsi teknologi dari sisi hulu, penguatan implementasi digitalisasi hilir dengan *e-commerce*; dan penguatan KAD dengan pemanfaatan IT dan integrasi data.

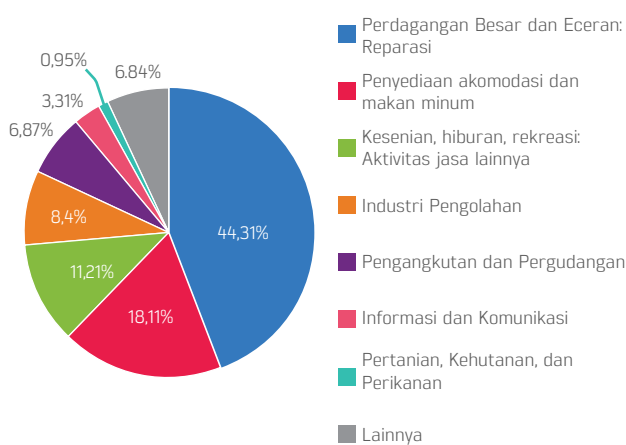
3.2. Program Kerja

Program kerja pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 disusun dalam kerangka 4K dan dikelompokkan dalam beberapa program strategis, yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Penetapan program kerja berpedoman pada arah kebijakan utama dalam mencapai

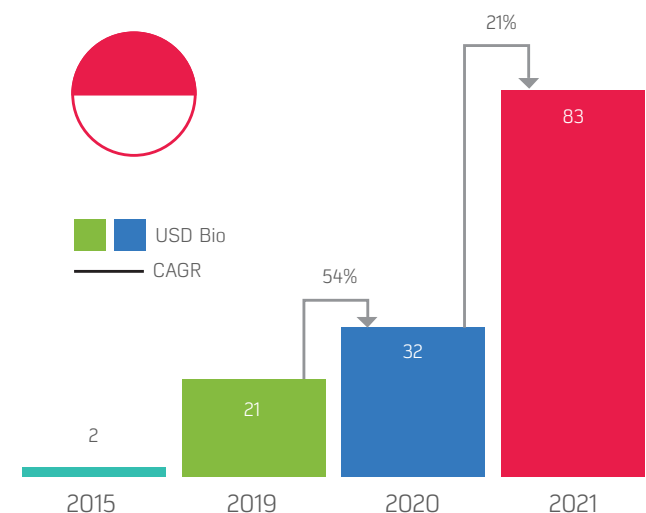


Sumber: The Economist

Grafik 3.1. Indeks Ketahanan Pangan



Grafik 3.2. Penggunaan Internet



Sumber: Google, Ban & Company

Grafik 3.3. Potensi Pertumbuhan *E-Commerce* Indonesia

sasaran inflasi, hasil *gap analysis* dan *lessons learned* dari evaluasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021, termasuk memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) K/L terkait. Program kerja tersebut menjadi acuan pelaksanaan tugas pengendalian inflasi dalam rangka pencapaian sasaran inflasi 2022-2024.

3.2.1 Keterjangkauan Harga

Berbagai program kerja dilakukan dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan mengelola permintaan.

Upaya stabilisasi harga dilakukan baik pada tingkat produsen maupun konsumen, melalui kebijakan penetapan harga pangan strategis yang menyeimbangkan biaya faktor produksi dengan daya beli masyarakat, kegiatan pengawasan harga dan kecukupan stok secara berkala, serta optimalisasi kegiatan KPSH beras. Stabilitas harga menjadi faktor pertimbangan utama dalam penetapan kebijakan komoditas *administered prices* (AP) ke depan, di tengah tekanan eksternal dan reformasi fiskal, serta upaya dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Sementara itu, upaya mengelola sisi permintaan dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan internal perekonomian terutama untuk mengantisipasi tekanan inflasi ke depan seiring akselerasi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi.

3.2.1.1. Stabilisasi Harga

1. Review Harga Eceran Tertinggi (HET) dan/atau Harga Acuan Pembelian dan Penjualan. Kementerian Perdagangan secara regular akan melakukan *review* HET dan/atau Harga Acuan Pembelian dan Penjualan atas komoditas pangan strategis, dengan target setidaknya dilakukan satu kali dalam setahun.

2. Peningkatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, termasuk saat HBKN.

Upaya stabilisasi harga diukur berdasarkan koefisien variasi komoditas hasil pertanian pangan sebesar 2,9%, hortikultura sebesar 23,0%, hasil industri sebesar 4,9%, dan hasil peternakan serta perikanan sebesar 5,9%. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Perdagangan sebagai K/L koordinator juga akan didukung oleh Pemda (melalui Kementerian Dalam Negeri). Sementara itu, kegiatan pengawasan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di lapangan akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) minimal empat kali setahun, termasuk saat HBKN.

3. Optimalisasi KPSH beras. Kegiatan KPSH BULOG akan dilakukan sepanjang tahun sesuai instruksi Menteri Perdagangan untuk menjaga penyaluran beras dan kecukupan stok berada di kisaran 0,8 - 1,3 juta ton per tahun.

4. Penetapan kebijakan komoditas AP yang dikoordinasikan dan mempertimbangkan sasaran inflasi IHK serta kondisi fiskal. Kebijakan AP ke depan menjadi sangat krusial, mengingat terdapat potensi penyesuaian harga komoditas AP khususnya energi seiring upaya reformasi fiskal dan transformasi subsidi oleh pemerintah, di tengah melebarnya deviasi antara harga jual komoditas energi domestik dengan harga keekonomiannya. Sementara itu, untuk komoditas angkutan udara, kebijakan penyesuaian tarif batas atas dan batas bawah juga dapat memengaruhi volatilitas inflasi. Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan beserta K/L terkait lainnya akan berkoordinasi memastikan penerapan kebijakan komoditas AP yang terkoordinasi dengan memerhatikan *magnitude*, *timing*, dan *sequencing* agar inflasi IHK tetap dalam sasarannya.

5. Menjaga volatilitas nilai tukar. Dalam rangka pengendalian inflasi khususnya dari tekanan harga barang impor diperlukan nilai tukar yang terkendali dengan volatilitas yang terjaga. Bank Indonesia berupaya menjaga volatilitas Rupiah maksimal sebesar 15% pada 2022-2023, dan maksimal sebesar 10% pada 2024. Langkah tersebut ditempuh antara lain melalui berbagai kebijakan stabilisasi, akselerasi pendalaman pasar keuangan, dan penguatan cadangan devisa termasuk mendorong upaya penggunaan mata uang lokal melalui kerja sama keuangan internasional.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah oleh Bank Indonesia mencakup (a) *triple intervention* di pasar valuta asing (valas), pasar berjangka valas atau *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) untuk menjaga nilai tukar sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar; (b) kebijakan suku bunga (BI7DRR); (c) kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM); dan (d) Operasi Moneter (OM). Sementara itu, akselerasi pendalaman pasar keuangan dilakukan antara lain melalui pengembangan produk lindung nilai, pengembangan transaksi DNDF untuk mata uang LCS dan *cross currency swap*; serta perluasan pelaku transaksi *Interest Rate Swap* (IRS)

dan *Overnight Index Swap* (OIS). Selanjutnya, upaya penguatan cadangan devisa dilakukan melalui kerja sama keuangan internasional antara lain (a) penguatan Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI); dan (b) penggunaan mata uang lokal melalui kerja sama *local currency settlement*, baik dalam bentuk *swap* bilateral dengan bank sentral lain dan multilateral, ataupun bank yang ditunjuk oleh kedua negara (*Appointed Cross Currency Dealer/ACCD*).

3.2.1.2. Mengelola Permintaan

Menjaga keseimbangan internal perekonomian. Dengan tetap mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik, kebijakan ke depan akan mempertimbangkan potensi tekanan inflasi sebagai dampak dari (a) meningkatnya permintaan seiring berlanjutnya akselerasi pemulihan ekonomi; (b) kebijakan moneter akomodatif selama masa pandemi termasuk dampak pembiayaan dari PEN; serta (c) konsolidasi fiskal pemerintah termasuk rencana transformasi subsidi energi dan perpajakan.

Bauran kebijakan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung akselerasi pemulihan ekonomi lebih lanjut. Untuk itu, koordinasi antara otoritas moneter dan otoritas fiskal perlu terus diperkuat, termasuk sinergi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendorong kredit dan pembiayaan.

3.2.2 Ketersediaan Pasokan

Upaya menjaga ketersediaan pasokan dilakukan melalui berbagai program strategis, yaitu optimalisasi **Produksi Domestik** komoditas pangan, **Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah** yang mencakup beras dan komoditas lainnya, dan **Mekanisme Impor-Ekspor**, terutama penguatan impor untuk memenuhi kekurangan produksi pangan strategis dalam negeri. Selain itu, **Kelembagaan Petani** terus diperkuat untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung ketersediaan pasokan.

3.2.2.1 Memperkuat Produksi Domestik

1. Perluasan adopsi teknologi *internet of things* (IOT) untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Upaya peningkatan produktivitas pangan terus dioptimalkan khususnya melalui perluasan adopsi teknologi pertanian, untuk mengatasi tantangan struktural fluktuasi

pasokan antarwaktu dan antarwilayah. Mengacu pada hasil evaluasi kegiatan serupa yang telah dilakukan sebelumnya, Bank Indonesia akan melakukan upaya penyempurnaan model bisnis pada 2022. Selain itu, upaya perluasan implementasi adopsi teknologi pertanian akan dilakukan pada 5 UMKM pangan (2022), 7 UMKM pangan (2023), dan 10 UMKM pangan (2024).

- 2. Pengembangan lumbung pangan (*food estate*).** Untuk mencapai ketahanan pangan domestik dalam jangka panjang, Kementerian Pertanian akan melanjutkan upaya pengembangan lumbung pangan (*food estate*) di sejumlah wilayah. Pengembangan tersebut akan diupayakan dengan meningkatkan produksi beberapa komoditas pangan. Pada 2022, produksi komoditas kentang, bawang merah, dan bawang putih masing-masing direncanakan sebesar 40,0 ribu ton, 39,2 ribu ton, dan 74 ribu ton. Pada 2023, masing-masing komoditas tersebut akan ditingkatkan produksinya menjadi 159,0 ribu ton, 118,0 ribu ton, dan 30,0 ribu ton. Khusus 2024, Kementerian Pertanian akan fokus pada peningkatan produksi beras sebesar 1,4 juta ton. Selain itu, selama 2022-2024, akan dilakukan perluasan *food estate* di beberapa wilayah yaitu Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
- 3. Pengembangan kampung hortikultura.** Program ini merupakan upaya Kementerian Pertanian mengonsolidasi lahan-lahan dalam satu kawasan kesatuan administratif (kampung atau desa) untuk mendorong produksi hortikultura berdaya saing dan ramah lingkungan. Kampung hortikultura bertujuan untuk mendukung kesejahteraan petani melalui pembinaan praktik budidaya yang baik, dan fasilitasi terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk sarana dan prasarana, serta pengolahan pascapanen. Dengan upaya ini, diharapkan dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan melalui pemanfaatan KUR, mekanisasi, pengairan, kelembagaan, hingga pemasaran dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani. Pada 2022-2024, Kementerian Pertanian akan melaksanakan pengembangan kampung hortikultura untuk komoditas bawang merah dan cabai merah dengan target 400 kampung bawang merah dan 800 kampung aneka cabai setiap tahun.
- 4. Pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian.** Program kerja ini merupakan kelanjutan dari peta jalan sebelumnya untuk

terus mendorong produksi domestik. Dalam hal ini, Kementerian PUPR akan melaksanakan pembangunan jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi dengan target masing-masing sebesar 80.818 ha dan 137.556 ha setiap tahun. Sementara itu, Perum BULOG akan mendorong penyerapan pagu anggaran PMN untuk pembangunan sarana produksi dan infrastruktur dengan target pada 2022, 2023, dan 2024 masing-masing sebesar 50%, 75%, dan 100%.

5. Penerapan praktik budidaya sesuai *Good Agricultural Practices (GAP)*, *Good Handling Practices (GHP)*, dan *Good Manufacturing Practices (GMP)*.

Peningkatan produksi yang didukung dengan penerapan praktik budidaya yang baik dapat lebih mendorong kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Dalam program kerja ini, Kementerian Pertanian mengupayakan peningkatan jumlah kebun dan lahan usaha yang telah menerapkan GAP, GHP, dan GMP dengan target sebesar 5% setiap tahun.

6. Peningkatan produksi protein hewani. Kebutuhan domestik Indonesia akan pakan protein hewani untuk kelompok daging pada 2020 meningkat 4,4% (yoy) menjadi sebesar 4,05 gram/kapita/hari, dari sebesar 3,88 gram/kapita/hari pada 2019. Di sisi lain, ketersediaan protein hewani khususnya daging sapi, masih perlu didukung pasokan impor, sehingga masih rentan mengalami fluktuasi harga. Sejalan dengan rencana strategis Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ketersediaan pangan asal ternak salah satunya melalui produksi daging, maka Kementerian Pertanian menetapkan target produksi protein hewani (kelompok daging) sebesar 4,59 juta ton (2022), 4,64 juta ton (2023), dan 4,70 juta ton (2024).

7. Percepatan swasembada gula. Kementerian Pertanian berupaya untuk mendorong Indonesia mencapai swasembada gula konsumsi pada 2023. Saat ini, neraca gula konsumsi (produksi dalam negeri) masih belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan domestik sehingga masih didukung oleh impor. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian mendorong percepatan swasembada gula antara lain melalui upaya ekstensifikasi, yaitu penambahan luas wilayah lahan tebu. Pada 2022, 2023, dan 2024, luas wilayah lahan tebu ditargetkan meningkat masing-masing sebesar 458.337 ha, 485.524 ha, dan 509.457 ha.

8. Penguatan produksi *crude palm oil (CPO)*, melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Program kerja ini secara umum tidak hanya ditujukan untuk ketersediaan pasokan domestik, namun juga untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi oleh Kementerian Pertanian mencakup peningkatan produksi, produktivitas, dan perluasan lahan kebun sawit. Pada 2022, 2023, dan 2024, peningkatan produksi ditargetkan masing-masing sebesar 52,9 juta ton, 56,0 juta ton, serta 59,4 jt ton, sementara peningkatan produktivitas ditargetkan masing-masing sebesar 3,85 ton/ha, 4,0 ton/ha, dan 4,0 ton/ha. Adapun untuk perluasan lahan kebun sawit, ditargetkan masing-masing sebesar 15.459.163 ha, 15.845.642 ha, dan 16.241.783 ha.

9. Peningkatan ketersediaan telur ayam ras. Upaya menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan untuk telur ayam ras sangat penting, mengingat saat ini terdapat *excess supply* telur ayam sekitar 23,421 ton (per Oktober 2021), sehingga mendorong rendahnya harga telur ayam. *Excess supply* tersebut antara lain dipengaruhi oleh (a) permintaan yang menurun selama





pandemi, khususnya dari sektor horeca; (b) beralihnya peternak broiler menjadi peternak layer; (c) dan indikasi bocornya telur hasil program *Cutting Hatching Eggs* (HE). Namun demikian, Kementerian Pertanian tetap berupaya memastikan ketersediaan pasokan telur melalui upaya peningkatan produksi yang dijaga dalam tingkat yang rendah, yaitu sebesar 2,16% (yoy) setiap tahun.

- 10. Modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian.** Program kerja ini tidak hanya bertujuan menjaga ketersediaan pasokan dan mendukung upaya ketahanan pangan, namun juga untuk meningkatkan nilai tambah produk hortikultura sebagai bagian dari upaya hilirisasi bahan baku industri. Untuk itu, target yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian adalah peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pascapanen komoditas hortikultura sebesar 5% setiap tahun.
- 11. Penguatan pasokan bahan bakar non BBM.** Program ini merupakan lanjutan program Pemerintah yang mewajibkan pencampuran 30% Biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis Solar (menghasilkan produk Biosolar B30) yang telah diimplementasikan sejak Januari 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 tahun 2015 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Program ini perlu dijaga konsistensinya dalam rangka mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor *fossil fuel* di

tengah adanya tekanan kenaikan harga minyak global. Sesuai dengan *timeline*, Kementerian ESDM menetapkan target penggunaan biodiesel minimal sebesar 30% dalam campuran BBM hingga tahun 2024.

3.2.2.2 Cadangan Pangan Pemerintah

Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Program kerja CPP perlu terus diperkuat dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Namun demikian, pemenuhan cadangan pangan selain beras masih menghadapi sejumlah tantangan, mengingat perlunya kebijakan maupun kerja sama lintas K/L, termasuk ketersediaan anggaran. Dalam program kerja ini, Perum BULOG menetapkan target yang akan dicapai berupa pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) minimal sebesar 1 juta ton sepanjang tahun. Sementara itu, untuk komoditas lain akan dilakukan upaya pemenuhan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP), dengan target berupa kajian pembentukan CJP yang disempurnakan dan/atau rekomendasi pembentukan CJP. Implementasi program kerja ini dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Perum BULOG, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan.

3.2.2.3 Pengelolaan Mekanisme Impor-Ekspor

- 1. Diversifikasi negara asal impor komoditas pangan strategis.** Ketergantungan importasi komoditas pangan pada satu negara tertentu berisiko mengganggu stabilitas dan ketersediaan pasokan apabila terdapat gangguan pasokan di negara tersebut. Untuk itu, diperlukan upaya diversifikasi negara asal impor

sebagai mitigasi risiko. Kementerian Perdagangan akan berupaya menjajaki kerja sama impor dengan sejumlah negara lain dengan target penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) impor. Pada 2022, target MoU impor direncanakan dengan Chile dan Meksiko, sementara pada 2023 dengan Brazil dan Kolombia. Kerja sama perdagangan dengan negara lainnya pada 2024 tetap akan terus dijajaki sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan, khususnya yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

2. **Penguatan realisasi impor bahan pangan untuk mendukung ketersediaan pasokan.** Berdasarkan hasil evaluasi pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021, masih terdapat kendala pada mekanisme impor khususnya pada komoditas gula, bawang bombay, dan bawang putih sehingga mendorong kenaikan inflasi komoditas tersebut khususnya pada triwulan I 2020. Untuk itu, Kementerian Perdagangan berkomitmen memperkuat mekanisme realisasi impor bahan pangan melalui perencanaan impor yang tepat jumlah dan tepat waktu agar pasokan dapat terjaga dan mengurangi gejolak harga.

3.2.2.4. Penguatan Kelembagaan

1. **Penguatan kelembagaan petani pangan, perkebunan sawit, dan petani tebu.** Dalam rangka meningkatkan produksi dan menjaga ketersediaan pangan, penguatan kelembagaan petani perlu terus konsisten dilakukan guna mendukung kapabilitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Upaya penguatan kelembagaan petani oleh Kementerian Pertanian pada jangka menengah akan fokus pada petani komoditas pangan (hortikultura), perkebunan sawit, serta petani tebu. Hal ini mengingat masih terdapat kendala pelaksanaan di lapangan, antara lain akibat rendahnya jumlah petani yang tergabung dalam kelompok formal, sehingga menyulitkan pemberian bantuan pemerintah, pelaksanaan program kemitraan, hingga akses pembiayaan.

Untuk petani sawit, lemahnya kelembagaan pekebun dan minimnya jumlah pekebun yang tergabung dalam kelembagaan pekebun menyebabkan fasilitasi kemitraan yang berkelanjutan untuk perolehan harga yang wajar dan mendapatkan akses pembiayaan pekebun belum optimal. Khusus petani gula, kendala yang dihadapi juga termasuk kemitraan dengan pabrik gula yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Adapun target yang

akan dicapai dari program kerja ini pada 2022, 2023, dan 2024 adalah (a) upaya korporatisasi pembentukan klaster petani (hortikultura), masing-masing sebesar 65 klaster, 150 klaster, dan 350 klaster; (b) fasilitasi kemitraan dan deregulasi kelapa sawit masing-masing di 10 provinsi, 15 provinsi, dan 19 provinsi; serta (c) mekanisme beli putus tebu dengan pabrik gula masing-masing sebanyak 7 pabrik, 15 pabrik, dan 23 pabrik.

2. **Peningkatan indeks aksesibilitas untuk pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.** Kendala yang masih kerap dihadapi oleh petani adalah terkait kurangnya pembiayaan atau modal untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, pemerintah secara konsisten terus berupaya meningkatkan akses pembiayaan dan melindungi usaha pertanian, sejalan dengan arahan Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2021. Dalam program ini, target peningkatan indeks aksesibilitas yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian pada 2022, 2023, dan 2024 masing-masing sebesar 67,13%, 67,25%, dan 67,32%.
3. **Peningkatan nilai penerbitan resi pada Sistem Resi Gudang (SRG) dan nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK).** Permasalahan yang juga seringkali dihadapi oleh petani adalah rendahnya posisi tawar petani dalam menjual produknya, termasuk kesulitan untuk menyimpan stok apabila belum dapat menjual produknya saat harga sedang turun atau permintaan sedang rendah, serta permasalahan panjangnya rantai pemasaran komoditas. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah memberikan fasilitasi melalui SRG dan PLK. SRG saat ini telah digunakan sebagai (a) instrumen tunda jual/manajemen stok pada saat harga komoditas turun sehingga dapat menjadi skema mitigasi risiko fluktuasi harga, (b) instrumen pembiayaan perdagangan dengan jaminan barang (komoditi) yang disimpan di gudang sehingga dapat membuka akses permodalan usaha khususnya utk petani dan UMKM, serta (c) pendukung kegiatan perdagangan komoditas, dimana transparansi informasi ketersediaan stok dan mutu komoditas dalam SRG akan meningkatkan kepercayaan dan keamanan aktivitas perdagangan, mendukung aktivitas pasca panen, serta mendorong daya saing.

Adapun PLK telah dimanfaatkan sebagai (a) sarana untuk memfasilitasi pertemuan penjual dan pembeli secara langsung dan melakukan transaksi, dan (b) instrumen untuk menciptakan harga yang transparan

dan memperpendek mata rantai pemasaran. Namun demikian, saat ini pemanfaatan SRG dan PLK oleh pelaku usaha masih belum sepenuhnya optimal, sehingga pemerintah akan terus mendorong pemanfaatannya untuk mendukung ketersediaan pasokan dan selanjutnya menjaga stabilitas harga serta menggerakkan ekonomi daerah. Kementerian Perdagangan dengan didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoptimalkan SRG dan PLK melalui peningkatan transaksi SRG maupun PLK. Target peningkatan transaksi SRG dan PLK yang akan dicapai masing-masing sebesar 9% dan 5% (2022), 12% dan 7% (2023), serta 14% dan 10% (2024) dengan *baseline* tahun 2019 dan mengecualikan transaksi Gula Kristal Rafinasi pada PLK.

4. **Optimalisasi Holding BUMN Klaster Pangan.** Upaya penguatan kelembagaan memerlukan koordinasi dan integrasi badan usaha pangan di sepanjang rantai pasok, untuk mempercepat upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 untuk mencapai kedaulatan pangan pada 2024, Pemerintah membentuk *Holding* BUMN Pangan sebagai gabungan sejumlah BUMN di bidang pangan, sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang penggabungan BUMN bidang pangan di bawah koordinasi PT. RNI sebagai induk.

Melalui *Holding* BUMN klaster pangan, pemangku kepentingan seperti klaster pangan dapat meningkatkan skala usaha, akses pendanaan, dan profitabilitas, sementara dalam ekosistem pangan nasional dapat tercipta sinergi lintas BUMN, klaster, dan swasta. Di sisi masyarakat, terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi petani, peternak, dan nelayan kecil, serta pemberdayaan dan peningkatan produktivitas UMKM. Selanjutnya, diharapkan dapat terwujud peningkatan produksi untuk mendorong swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Dalam jangka menengah, optimalisasi *Holding* BUMN klaster pangan oleh Kementerian BUMN dilakukan antara lain melalui peningkatan produktivitas tebu dan akuisisi mitra warung pangan. Target untuk produktivitas tebu pada 2022, 2023, dan 2024 masing-masing sebesar 76 ton/ha, 77 ton/ha, dan 80 ton/ha. Sementara itu, target akuisisi mitra warung pangan masing-masing sebesar 90 ribu mitra, 120 ribu mitra, dan 150 ribu mitra.

3.2.3. Kelancaran Distribusi (K3)

Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi, Pemerintah melakukan berbagai program kerja melalui program strategis berupa **penguatan KAD** dan peningkatan **infrastruktur perdagangan**, sebagai salah satu upaya mengurangi disparitas inflasi antar daerah.

3.2.3.1 Penguatan KAD

1. **Penguatan dan Perluasan KAD.** Mengacu pada hasil *lessons learned* dari program KAD pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021, kegiatan KAD masih perlu terus dioptimalkan. Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia per November 2021 kepada sejumlah daerah yang melakukan KAD, terdapat KAD yang kerjasamanya tidak dan/atau belum diperpanjang dan tidak tercatat adanya transaksi. Selain itu, peningkatan jumlah KAD saat ini belum dapat diikuti dengan perbaikan volatilitas inflasi VF antardaerah. Dalam rangka penguatan dan perluasan KAD, target yang akan dicapai oleh Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia pada 2022-2024 adalah peningkatan jumlah KAD sebesar 10%, dan/atau penambahan jenis komoditas yang ditransaksikan, dan/atau penambahan volume transaksi setiap tahun.
2. **Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/ Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI).** Program kerja ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian yang ditujukan untuk mengurangi disparitas inflasi antardaerah. Target yang akan dicapai adalah (a) pelaksanaan kegiatan di seluruh wilayah Indonesia, yaitu 34 provinsi dan 1 kegiatan di pusat; serta (b) volume penjualan pada tahun 2022, 2023, dan 2024 masing-masing meningkat sebesar 500 ton/tahun.

3.2.3.2. Peningkatan Infrastruktur Perdagangan

1. **Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP.** Program ini merupakan bentuk komitmen

Pemerintah untuk memastikan kelancaran distribusi hingga ke wilayah pelosok yang selanjutnya dapat mengurangi disparitas harga antardaerah. Target yang akan dicapai mencakup pemberian subsidi angkutan udara dan penyelenggaraan angkutan laut oleh Kementerian Perhubungan, serta penambahan jalan mantap oleh Kementerian PUPR. Pelaksanaan program kerja ini juga didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Target yang akan dicapai pada tahun 2022, 2023, dan 2024 adalah (a) 43 subsidi rute angkutan udara, yang terdiri dari 41 perintis kargo, 2 subsidi kargo setiap tahun; (b) penyelenggaraan angkutan laut perintis 117 trayek; dan/atau tol laut 34 trayek; dan/atau angkutan kapal ternak sebanyak 6 trayek (selama 2022-2024); serta (c) panjang jalan mantap masing-masing sebesar 93%, 95%, dan 97%.

2. **Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir**, untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan, memperlancar distribusi bahan pangan, dan memperluas akses petani kepada masyarakat. Hal ini terutama memanfaatkan peluang dari semakin berkembangnya teknologi dan tren digitalisasi, serta perilaku konsumen yang mulai banyak melakukan pembelian secara *online* melalui *e-commerce* khususnya pada era pandemi Covid-19. Program kerja ini dilakukan melalui (a) fasilitasi UMKM pangan binaan Bank Indonesia dengan *e-commerce* di level nasional maupun daerah; dan (b) peningkatan volume transaksi PasTani oleh Kementerian Pertanian. Target fasilitas UMKM pangan pada tahun 2022, 2023, dan 2024 masing-masing sebanyak 10%, 20%, dan 30% dari total jumlah UMKM pangan binaan dan mitra Bank Indonesia. Sementara itu, volume transaksi PasTani Kementerian Pertanian ditargetkan meningkat 10% setiap tahun.

3.2.4. Komunikasi Efektif (K4)

Komunikasi efektif dalam rangka pengendalian inflasi dilaksanakan melalui program strategis **(a) perbaikan kualitas data** untuk mendukung asesmen dan perumusan kebijakan, termasuk untuk mengurangi risiko spekulasi akibat adanya *assymetric information*; **(b) koordinasi pusat dan daerah** dalam rangka harmonisasi upaya pengendalian inflasi serta mendukung kehandalan TPID; serta **(c) mengendalikn ekspektasi inflasi** agar terjaga dalam sasarannya melalui pelaksanaan bauran kebijakan pemerintah yang kredibel dan terpercaya.

3.2.4.1 Perbaikan Kualitas Data

1. **Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di pusat dan daerah.** Upaya pengendalian inflasi perlu didukung kualitas data dan informasi yang terintegrasi baik dari pusat dan daerah, serta dipublikasikan secara berkala untuk mendukung asesmen. Dalam program kerja ini, Kementerian Pertanian akan menyediakan data pasokan pangan strategis nasional dan daerah melalui panel harga pada aplikasi Sistem Monitoring Stok Pangan Strategis Nasional (Simonstok). Aplikasi dimaksud bertujuan untuk mengetahui besaran stok pangan di masyarakat, serta neraca surplus dan defisit pangan setiap minggunya, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan intervensi pangan yang diperlukan. Pada tahun 2022-2024, upaya penyediaan data melalui aplikasi Simonstok oleh Kementerian Pertanian difokuskan pada menjaga kesinambungan ketersediaan data pasokan pangan strategis di 34 provinsi maupun data nasional.
2. **Peningkatan kualitas dan keakuratan data PIHPS sebagai salah satu *leading indicator* pergerakan harga dan pasokan pangan nasional.** Program kerja ini perlu terus dilakukan secara konsisten, mengingat ketersediaan data harga dan pasokan yang akurat berperan penting dalam mendukung asesmen dan pengambilan kebijakan. Data pasokan yang akurat dan tersedia secara *real time* dapat digunakan sebagai *early warning system* bagi pemerintah pusat dan daerah, dalam melakukan proyeksi kecukupan pasokan pangan ke depan. Selain itu, data tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan respon kebijakan yang strategis dan antisipatif untuk meredam potensi gejolak harga pangan. Data harga PIHPS juga perlu terus diperkuat, khususnya terkait aspek korelasinya dengan data inflasi BPS, agar dapat menjadi referensi harga yang lebih akurat. Pada tahun 2022, upaya peningkatan kualitas dan keakuratan data PIHPS oleh Bank Indonesia dilakukan melalui penyediaan dan publikasi data pasokan komoditas pangan di seluruh provinsi. Adapun pada 2023 dan 2024, data pasokan yang telah dipublikasi kemudian dievaluasi kesinambungannya dan juga diperluas, sehingga PIHPS dapat menjadi *leading indicator* pergerakan harga dan pasokan pangan nasional. Sementara itu, akurasi data harga PIHPS dengan data inflasi BPS akan terus dijaga korelasinya minimal sebesar 0,8.

3.2.4.2. Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah

1. Penyusunan Peta Jalan TPID sebagai tindak lanjut penetapan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional.

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-24 digunakan sebagai panduan dan rekomendasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemda dalam Peta Jalan TPID 2022-2024. Namun demikian, tantangan yang dihadapi dan kapabilitas yang dimiliki oleh setiap TPID dalam pengendalian inflasi daerah dapat berbeda-beda. Untuk itu, penyusunan *guideline* pengendalian inflasi daerah selain mengacu pada upaya di tingkat nasional, juga perlu mempertimbangkan konteks dan permasalahan inflasi di masing-masing daerah. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan target penyusunan Peta Jalan TPID dapat dilakukan oleh seluruh (100%) TPID Provinsi.

2. Peningkatan kehandalan TPID

antara lain dilakukan melalui program pembinaan TPID/*capacity building*/sosialisasi. Dalam rangka penguatan upaya pengendalian inflasi di daerah, diperlukan peningkatan peran dan kapabilitas daerah melalui forum TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya peningkatan kehandalan TPID melalui pembinaan, *capacity building* dan sosialisasi perlu dilakukan secara kontinyu untuk terus memperkuat kelembagaan TPID. Selanjutnya, keberhasilan dari upaya peningkatan kehandalan TPID dalam program pengendalian inflasi daerah harus tercermin dari evaluasi kinerja TPID. Evaluasi kinerja TPID dilakukan dengan menggunakan dua aspek pendekatan, yakni aspek tujuan (*outcome*) yang diukur dari hasil capaian tingkat inflasi daerah dibandingkan targetnya, serta aspek proses yang diukur dari capaian

program kerja di setiap daerah. Selanjutnya, evaluasi kinerja TPID dimaksud juga akan menentukan daerah yang akan menerima TPID *Award* setiap tahunnya. Dalam program kerja ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia menetapkan target yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yaitu berupa tingkat kehandalan TPID IHK sebesar 80-90% (median), sementara untuk TPID non IHK sebesar 40-50% median.

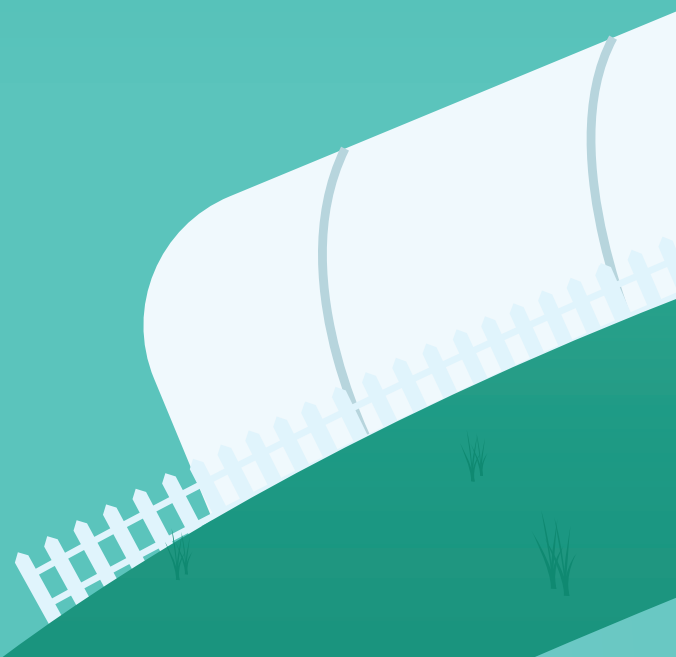
3.2.4.3. Pengendalian Ekspektasi Inflasi

Pelaksanaan bauran kebijakan yang kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi yang rutin dan terpercaya.

Upaya pengendalian inflasi tidak lepas dari pelaksanaan bauran kebijakan termasuk pengendalian inflasi yang kredibel dan komunikasi yang dilakukan secara efektif dan berkesinambungan. Dalam hal ini, berbagai upaya komunikasi kebijakan akan dilakukan secara rutin dan terus diperkuat antara lain melalui publikasi *press release*, *press conference*, maupun upaya strategi komunikasi lainnya melalui berbagai media/jalur komunikasi. Melalui upaya ini, ekspektasi inflasi masyarakat diharapkan dapat terjaga di tengah dinamika perekonomian global maupun domestik. Ekspektasi inflasi yang tercermin dari angka proyeksi inflasi oleh *Consensus Forecast* (CF) ditargetkan sebesar $3,0\% \pm 1\%$ pada tahun 2022-2023, serta sebesar $2,5\% \pm 1\%$ pada tahun 2024.

LAMPIRAN

TABEL PETA
JALAN
PENGENDALIAN
INFLASI
2022-2024





Rekapitulasi Proker Peta Jalan 2022 – 2024 (1)

4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	TIMELINE TARGET			KETERANGAN
			2022	2023	2024	
Keterjangkauan Harga	Stabilisasi Harga	1. Review Harga Eceran Tertinggi dan/atau Harga Acuan Pembelian dan Penjualan	Minimal 1x/tahun			• Kemendag, Kementan
		2. Stabilisasi harga dan stok bahan pokok, melalui koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan satgas pangan: <ul style="list-style-type: none"> Koefisien variasi harga bahan pokok Monitoring wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> (i) pertanian pangan 2.9%; (ii) hortikultura 23,0%; (iii) hasil industri 4.9%; dan (iv) peternakan & perikanan 5.9% Minimal 4x/tahun (termasuk HBKN) 			• Kemendag, Kemendagri
3. Optimalisasi kegiatan KPSH beras		0,8 - 1,3 juta ton per tahun			• Bulog	
4. Penetapan kebijakan harga komoditas yg diatur Pemerintah telah dikoordinasikan dgn mempertimbangkan sasaran inflasi IHK dan kondisi fiskal		Rekomendasi kebijakan dengan <i>magnitude, timing, dan sequencing</i> yang terukur			• Kemenko, Kemenkeu, ESDM, Kemenhub	
5. Menjaga volatilitas nilai tukar		★	max 15%	max 15%	max 10%	• BI
	Mengelola Permintaan	6. Menjaga keseimbangan internal perekonomian	Bauran kebijakan bank sentral dan pemerintah			• BI, Kemenko, Kemenkeu
Ketersediaan Pasokan	Produksi Dosmetik	1. Perluasan adopsi teknologi (IOT) dalam budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas UMKM pangan melalui: <ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan bisnis model Penguatan/replikasi pd UMKM binaan 	• Tersedianya model bisnis	-	-	• BI
		2. Pengembangan lumbung pangan (<i>food estate</i>) melalui peningkatan: <ul style="list-style-type: none"> Produksi pangan/horti Wilayah lumbung pangan di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Kentang 400 rb ton Bawang merah 39,2 rb ton Bawang putih 74 rb ton 	<ul style="list-style-type: none"> Kentang 190 rb ton Bawang merah 118,0 rb ton Bawang putih 30,0 rb ton 	Beras 14 jt ton	• Kementan
		3. Pengembangan kampung hortikultura <ul style="list-style-type: none"> Bawang merah Aneka cabai 	<ul style="list-style-type: none"> 400 kampung/tahun 800 kampung/tahun 			• Kementan
		4. Pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian: <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jaringan irigasi Rehabilitasi jaringan irigasi Penyerapan anggaran PMN 	<ul style="list-style-type: none"> 80.818 Ha/tahun 137.556 Ha/tahun 			• Kemen PUPR
		5. Penerapan praktik budidaya sesuai <i>Good Agricultural Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP), & Good Manufacturing Practices (GMP)</i> : <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah kebun dan lahan usaha dengan GAP, GHP, dan GMP 	5%/tahun			• Kementan, Kemendagri (Pemda)
		6. Peningkatan produksi protein hewani	4,59 jt ton	4,64 jt ton	4,70 jt ton	• Kementan
		7. Percepatan swasembada gula, melalui <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan luas lahan tebu 	• 458.337 Ha	• 485.524 Ha	• 509.457 Ha	• Kementan
		8. Peningkatan CPO, melalui: <ul style="list-style-type: none"> Produksi CPO Produktivitas CPO Perluasan lahan kebun sawit 	<ul style="list-style-type: none"> 52,9 jt ton 3,85 ton/ha 15.459.163 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> 56,0 jt ton 4,0 ton/ha 15.845.642 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> 59,4 jt ton 4,0 ton/ha 16.241.783 Ha 	• Kementan
		9. Peningkatan ketersediaan telur ayam ras	2,16%/tahun			• Kementan
		10. Modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pascapanen komoditas hortikultura 	5%/tahun			• Kementan
		11. Penguatan pasokan bahan bakar non BBM: <ul style="list-style-type: none"> Porsi bio diesel dalam campuran BBM 	min. 30%			• Kemen ESDM
		Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	12. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> Beras (CBP) Jagung (CJP) 	<ul style="list-style-type: none"> CBP min. 1 juta ton sepanjang tahun Kajian pembentukan CJP yg disempurnakan dan/atau rekomendasi pembentukan CJP 		

Rekapitulasi Proker Peta Jalan 2022 – 2024 (2)

4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	TIMELINE TARGET			KETERANGAN
			2022	2023	2024	
	Mekanisme Ekspor-Impor	13. Diversifikasi negara asal impor komoditas pangan strategis melalui kerjasama MoU	Chile dan Meksiko	Brazil dan Kolombia	Negara lainnya	• Kemendag, Kementan
		14. Penguatan realisasi impor bahan pangan untuk mendukung ketersediaan pasokan	Impor bahan pangan tepat jumlah dan tepat waktu			• Kemendag
	Penguatan Kelembagaan	15. Penguatan kelembagaan petani pangan, perkebunan sawit, dan petani tebu, melalui: ★ • Korporatisasi klaster petani (hortikultura) • Fasilitasi kemitraan dan deregulasi kelapa sawit • Mekanisme beli putus tebu dengan pabrik gula	• 65 klaster • 10 provinsi • 7 pabrik gula	• 150 klaster • 15 provinsi • 15 pabrik gula	• 350 klaster • 19 provinsi • 23 pabrik gula	• Kementan
		16. Peningkatan indeks aksesibilitas untuk pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	67,13%	67,25%	67,32%	• Kementan, Kemenko, Kemendagri, Kemenkeu
		17. Peningkatan nilai penerbitan resi pada Sistem Resi Gudang (SRG) dan nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK)	9% (SRG) dan 5% (PLK)	12% (SRG) dan 7% (PLK)	14% (SRG) dan 10% PLK	• Kemendag, Kemenko
		18. Optimalisasi Holding BUMN Klaster Pangan, melalui: • Peningkatan produktivitas tebu • Akuisisi mitra warung pangan	• 76 ton/Ha • 90 ribu mitra	• 77 ton/Ha • 120 ribu mitra	• 80 ton/Ha • 150 ribu mitra	• Kementan
Kelancaran Distribusi	Penguatan KAD	1. Penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) ★	Kenaikan 10% jumlah KAD; dan/atau penambahan jenis komoditas dan/atau volume transaksi setiap tahun			• Kemendagri, BI
		2. Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/ Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI): • Lokasi kegiatan • Volume penjualan	• 34 provinsi dan pusat/tahun • Kenaikan 500 ton/tahun			• Kementan
	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	3. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP melalui: • Subsidi rute AU • Penyelenggaraan AL • Panjang jalan mantap	• 43 rute AU (41 perintis kargo, 2 subsidi kargo) setiap tahun • AL perintis 117 trayek; dan/atau tol laut 34 trayek; dan/atau angkutan kapal ternak (6 trayek)			• Kemenhub, Kemenko
		4. Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir melalui: • Fasilitasi UMKM pangan binaan dengan e-commerce di level nasional maupun daerah • Peningkatan volume transaksi PasTani	• 10%	• 20%	• 30%	• BI
			• 10%/tahun			• Kementan
Komunikasi Efektif	Memperbaiki Kualitas Data	1. Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di pusat dan daerah	35 lokasi (34 provinsi dan pusat) setiap tahun			• Kementan, Kemendagri
		2. Peningkatan kualitas dan keakuratan data PIHPS sebagai salah satu <i>leading indicator</i> pergerakan harga dan pasokan pangan nasional: • Data pasokan • Korelasi data harga dengan inflasi	• Publikasi	• Evaluasi kesinambungan	• Evaluasi dan pemanfaatan utk asesmen	• BI
	Koordinasi Pusat dan Daerah	3. Penyusunan peta jalan TPID sebagai tindak lanjut penetapan peta jalan pengendalian inflasi nasional	100% TPID provinsi	-		• Kemendagri, Kemenko
		4. Peningkatan kehandalan TPID a.l. melalui program pembinaan TPID/capacity building/sosialisasi: • Tingkat kehandalan TPID IHK • Tingkat kehandalan TPID non IHK	• 80-90 (median) • 40-50 (median)			• Kemenko, Kemendagri, BI
	Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	5. Pelaksanaan bauran kebijakan yg kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi yang rutin dan terpercaya: • CF terjaga di kisaran sasaran inflasi	• 3±1%		• 2.5±1%	• BI

★ Flagship Program

